

**PERUBAHAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI FILIPINA  
DALAM UPAYA STRATEGIS PENYELESAIAN SENGKETA  
LAUT TIONGKOK SELATAN, 2016–2022**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**NUR AZ ZAHRA SAPUTRI**

**NPM 1916071015**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**2024**

## ABSTRAK

### PERUBAHAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI FILIPINA DALAM UPAYA STRATEGIS PENYELESAIAN SENGKETA LAUT TIONGKOK SELATAN, 2016–2022

Oleh

**Nur Az Zahra Saputri**

Dalam menghadapi Tiongkok pada isu sengketa Laut Tiongkok Selatan, Filipina mengalami transisi kebijakan luar negeri. Pada pemerintahan Presiden Benigno Aquino III, Filipina berupaya bekerja sama dengan Amerika Serikat dalam menghadapi ancaman Tiongkok. Di sisi lain, di bawah pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte, Filipina cenderung mendekati Tiongkok serta menjauhi Amerika Serikat sebagai *traditional partner* Filipina. Di tengah ancaman keamanan, Duterte berupaya memaksimalkan hubungan Filipina dan Tiongkok lewat pelbagai kerja sama.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif dalam menjelaskan faktor-faktor apa saja yang berkontribusi dalam perubahan kebijakan luar negeri Filipina. Fokus penelitian ini adalah perubahan yang terjadi pada masa pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte di tahun 2016 hingga 2022. Dengan menggunakan teknik studi pustaka, penulis memaparkan data dari jurnal artikel serta data resmi dari pemerintahan yang terkait. Penulis juga menganalisis data yang dikumpulkan dengan teknik reduksi dan triangulasi data. Penelitian ini menggunakan teori perubahan kebijakan luar negeri oleh Charless F. Hermann, penulis memetakan beberapa faktor-faktor yang dapat berpengaruh pada sebuah kebijakan luar negeri, di antaranya, *leader driven*, *bureaucratic advocacy*, *domestic restructuring*, serta *external shocks*. Penulis juga menjelaskan upaya strategis yang dilakukan oleh Duterte dengan konsep *hedging* oleh Cheng Chwee Kuik.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor *leader driven* serta *external shocks* berkontribusi pada perubahan kebijakan luar negeri Filipina. Kedua faktor ini pula yang menjadikan Duterte melakukan upaya strategisnya dalam menghadapi Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan. Penulis juga menemukan bahwa terdapat upaya strategis Duterte yang sangat berkaitan dengan konsep *hedging*. Upaya ini dilakukan Duterte dalam rangka menjaga hubungan Filipina dengan Amerika Serikat sambil memaksimalkan hubungan dengan Tiongkok.

**Kata kunci:** Filipina, *hedging strategy*, Perubahan kebijakan luar negeri, sengketa Laut Tiongkok Selatan.

## ABSTRACT

### THE PHILIPPINES' FOREIGN POLICY CHANGES IN STRATEGIC EFFORTS OF SOUTH CHINA SEA DISPUTE SETTLEMENT, 2016–2022

By

NUR AZ ZAHRA SAPUTRI

In confronting China on the issue of resolving the South China Sea, the Philippines' is experiencing a transitional foreign policy. During the administration of President Benigno Aquino III, the Philippines' tried to cooperate with the United States in facing the Chinese threat. On the other hand, under the administration of President Rodrigo Duterte, the Philippines' tends to move closer to China and abandon the United States as the Philippines' traditional partner. In the midst of security threats, Duterte is trying to maximize relations between the Philippines' and China through various collaborations. This research uses a qualitative approach with descriptive analysis to explain what factors contributed to changes in Philippines' foreign policy. The focus of this research is on the changes that occurred during the administration of President Rodrigo Duterte from 2016 to 2022. Using literature study techniques, the author presents data from journal articles as well as official data from the relevant government. The author also analyzed the data collected using data reduction and triangulation techniques. This research uses the theory of foreign policy change by Charles F. Hermann. The author maps several factors that can influence foreign policy, including leader-driven, bureaucratic advocacy, domestic restructuring, and external shocks. The author also explains the strategic efforts made by Duterte with the hedging concept by Cheng Chwee Kuik. The results of this study indicate that leader-driven factors as well as external shocks contributed to changes in Philippines' foreign policy. The second factor also makes Duterte carry out his strategic efforts in dealing with China in the South China Sea. The author also found that Duterte's strategic efforts are closely related to the concept of hedging. Duterte made this effort in order to maintain the Philippines' relations with the United States while maximizing relations with China.

**Keywords:** Foreign Policy Changes, hedging strategy, South China Sea dispute, The Philippines'.

**PERUBAHAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI FILIPINA  
DALAM UPAYA STRATEGIS PENYELESAIAN SENGKETA  
LAUT TIONGKOK SELATAN, 2016–2022**

**Oleh**

**NUR AZ ZAHRA SAPUTRI**

**Skripsi**

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
**SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**Pada**

**Jurusan Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**2024**

Judul Skripsi

**: Perubahan Kebijakan Luar Negeri Filipina  
dalam Upaya Strategis Penyelesaian  
Sengketa Laut Tiongkok Selatan, 2016–  
2022**

Nama Mahasiswa

**: Nur Az Zahra Saputri**

Nomor Pokok Mahasiswa

**: 1916071015**

Jurusan

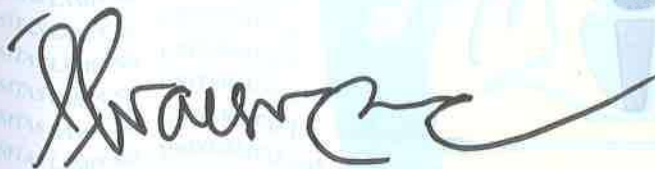
**: Hubungan Internasional**

Fakultas


**: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

**MENYETUJUI**

**1. Komisi Pembimbing**



**Iwan Sulisty, S.Sos., M.A.**  
NIP. 19860428 201504 1 004



**Roby Rakhmadi, S.Sos., M.Si**  
NIP. 19900606 201903 1 019

**2. Ketua Jurusan Hubungan Internasional**



**Simon Sumanjaya Hutagalung, S.A.N, M.P.A**  
NIP 19810628 200501 1 003

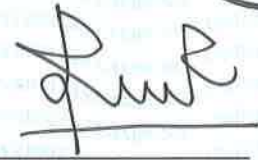
**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Iwan Sulistyo, S.Sos., M.A.**



**Sekretaris : Roby Rakhmadi, S.Sos., M.Si**



**Penguji Utama : Astiwi Inayah, S.IP., M.A.**



**2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**Dra. Ida Nurhaida, M.Si.**

**NIP. 19610807 198703 2 001**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 29 Februari 2024**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 29 Februari 2024

Yang membuat pernyataan,



Nur Az Zahra Saputri

NPM 1916071015

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada 3 Juni 2001 dari pasangan Bapak Nuryadi dan Ibu Gusti Ayu Isthingsih. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara.

Penulis mulai menempuh pendidikan formal di Taman Kanak-kanak (TK) Al-Huda Kemiling. Kemudian, penulis melanjutkan pendidikan formal di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Perumnas Way Halim, Madrasah

Tsanawiyah Negeri (MTsN) 2 Bandar Lampung, serta Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Bandar Lampung.

Pada tahun 2019, penulis diterima sebagai mahasiswa program studi S-1 Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik melalui jalur SNMPTN. Selama menjadi mahasiswa penulis aktif melakukan kegiatan akademik maupun non-akademik. Seperti misalnya, penulis pernah mengikuti pertukaran pelajar antar universitas di Universitas Jember. Pada tahun 2020, penulis pernah terpilih sebagai salah satu Staff Ahli Komisi II dalam UKM DPM UNILA. Penulis pernah mengikuti kegiatan magang di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang sebagai Asisten Kepala Kantor. Selain itu, penulis juga pernah mengikuti kegiatan magang secara daring pada salah satu organisasi nirlaba di India.



## **Motto**

*Be mindful of Allah, and you will find Him in front of you. Recognize and acknowledge Allah in times of ease and prosperity, and He will remember you in times of adversity. And know that what has passed you by (and you have failed to attain) was not going to befall you, and what has befallen you was not going to pass you by. And know that victory comes with patience, relief with affliction, and hardship with ease. (Thirmidhi : 2516)*

## **PERSEMBAHAN**

Untuk Papah, Mamah dan Adik Rama  
Serta seluruh pembaca

## SANWACANA

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah SWT karena berkat dan karuniaNya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi dengan judul *Perubahan Kebijakan Luar Negeri Filipina dalam Upaya Strategis Penyelesaian Sengketa Laut Tiongkok Selatan, 2016–2022* merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hubungan Internasional di Universitas Lampung.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
2. Bapak Simon Sumanjoyo Hutagalung, S.A.N., M.P.A., selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung;
3. Mas Iwan Sulistyio, S.Sos., M.A. selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi, yang senantiasa membimbing, memberikan arahan, dan masukan kepada penulis dengan sabar sehingga skripsi ini dapat menjadi lebih baik;
4. Bang Roby Rakhmadi, S.Sos., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Pendamping Skripsi, yang selalu membimbing dan memberikan masukan kepada penulis terkait skripsi;
5. Mba Astiwi Inayah, S.I.P., M.A. selaku Dosen Penguji Skripsi, yang senantiasa memberikan kritik, masukan serta motivasi kepada penulis selama proses penulisan Skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan baik;
6. Seluruh dosen dan staf Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung, yang telah banyak memberikan ilmu, waktu, tenaga, dan bantuan kepada penulis dari awal masa perkuliahan hingga penulisan skripsi;
7. Keluarga penulis, Papah, Mamah, Adik, yang telah mendoakan dan memberikan dukungan materiil serta moril selama perkuliahan hingga penulis menyelesaikan studinya;

8. Segenap teman-teman KKN Sukarame Baru yang telah memberikan dukungan kepada penulis;
9. Segenap teman-teman HI Angkatan 2019 yang telah membantu penulis dalam penyelesaian Skripsi ini. Semoga kebaikan selalu menyertai kalian;
10. Teruntuk teman-teman yang selalu mendengarkan keluhan penulis, Sherin Dwi, Jean Innur, Siti Handayani, dan Wulan Sari. Terima kasih atas doa dan dukungan yang kalian berikan. Semoga kebaikan selalu menyertai kalian.

Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan dan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, kritik, saran, dan masukan yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini.

Bandar Lampung, 29 Februari 2024

Nur Az Zahra Saputri  
NPM. 1916071015

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR .....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR SINGKATAN .....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Landasan Konseptual.....	10
2.1.1. Konsep Kebijakan Luar Negeri.....	10
2.1.2. Konsep Sengketa Teritorial.....	12
2.1.3. Konsep <i>Hedging</i> .....	14
2.1.4. Teori Perubahan Kebijakan Luar Negeri .....	16
2.2 Kerangka Pemikiran .....	20
BAB III METODE PENELITIAN .....	21
3.1 Jenis Penelitian .....	21
3.2 Tingkat Analisis.....	22
3.3 Fokus Penelitian.....	22
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	23
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	23
3.6 Teknik Analisis Data .....	24

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....	25
4.1    Gambaran Umum Kebijakan Luar Negeri Filipina terhadap AS dan Tiongkok .....	25
4.2    Upaya Strategis Penyelesaian Sengketa Laut Tiongkok Selatan .....	32
4.2.1. <i>Limited Bandwagoning</i> .....	33
4.2.2. <i>Binding Engagement</i> .....	34
4.2.3. <i>Economic Pragmatism</i> .....	34
4.2.4. <i>Dominance Denial</i> .....	36
4.2.5. <i>Indirect Balancing</i> .....	37
4.3    Perubahan Kebijakan Luar Negeri Filipina dalam Upaya Strategis Penyelesaian Sengketa Laut Tiongkok Selatan, 2016 — 2022.....	39
4.3.1.    Perubahan Prioritas Kebijakan Pertahanan Eksternal menjadi Internal .....	40
4.3.2.    Perubahan Hubungan Diplomatik Filipina terhadap AS.....	49
4.3.3.    Peningkatan Hubungan Kerja Sama Filipina dan Tiongkok.....	54
4.3.4.    Perubahan Sikap Filipina dengan ASEAN .....	61
BAB V SIMPULAN DAN SARAN .....	64
5.1    Simpulan.....	64
5.2    Saran .....	65
DAFTAR PUSTAKA .....	67

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Laut Tiongkok Selatan .....	2
Gambar 1. 2 Analisis VosViewer.....	6
Gambar 2. 2 Kerangka Pemikiran.....	20
Gambar 4. 1 Peta Sebaran Basis Militer AS di Filipina.....	26
Gambar 4. 2 Daftar urutan sumber investasi luar negeri Filipina .....	36
Gambar 4. 3 Grafik Pemisahan Kekuasaan Filipina .....	48
Gambar 4. 4 Survei terkait Keberadaan Militer AS di Filipina .....	54
Gambar 4. 5 Gambar perbandingan pengeluaran infrastruktur.....	56
Gambar 4. 6 Peningkatan Ekspor Filipina ke Tiongkok dalam dollar.....	57
Gambar 4. 7 Survei Publik terkait hubungan ekonomi Filipina-Tiongkok..	61

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Strategi Negara-Negara di Asia Tenggara terhadap Tiongkok... 16	
Tabel 4. 1 Total belanja militer pemerintahan Duterte ..... 39	
Tabel 4. 2 Strategi hedging Filipina..... 39	
Tabel 4. 1 Isi Perjanjian Formal MDT AS-Filipina ..... 27	
Tabel 4. 2 Total belanja militer pemerintahan Duterte ..... 39	
Tabel 4. 3 Strategi <i>hedging</i> Filipina..... 39	
Tabel 4. 4 Survei Publik Filipina terhadap persepsi AS dan Tiongkok..... 53	
Tabel 4. 5 Daftar Dokumen Kerja Sama Tahun 2016..... 55	



## **DAFTAR SINGKATAN**

APEC	: Asia-Pacific Economic Cooperation
AS	: Amerika Serikat
ASEAN	: Association of Southeast Asian Nations
ASEM	: Asia-Europe Meeting
AUKUS	: Australia, United Kingdom, United States
BBB	: Build, Build, Build
BBC	: British Broadcasting Corporation
CSIS	: Center for Strategic International Studies
DOF	: The Department of Finance
EDCA	: Enhanced Defense Cooperation Agreement
FON	: Freedom of Navigation
FONOP	: Freedom of Navigation Program
ISIS	: Islamic State of Iraq and ash-Sham
JCGC	: Joint Coast Guard Committee on Maritime Cooperation
MDT	: Mutual Defense Treaty
MILF	: Moro Islamic Liberation Front
MPAC	: Master Plan on ASEAN Connectivity
NEDA	: National Economic and Development Authority of Philippines'
SIPRI	: Stockholm International Peace Research Institute
UN	: United Nations
UNCLOS	: United Nations Convention on Law of the Sea

USGS : US Geological Survey  
VFA : Visiting Forces Agreement  
ZEE : Zona Ekonomi Eksklusif

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Penelitian ini akan memaparkan perubahan kebijakan luar negeri Filipina dalam upaya strategis penyelesaian sengketa Laut Tiongkok Selatan. Bagian ini terdiri dari lima bagian, mulai dari penjelasan penulis mengenai latar belakang yang berisi paparan terkait sengketa Laut Tiongkok Selatan yang terjadi di Filipina hingga pergeseran kebijakan luar negeri Filipina oleh Presiden Rodrigo Duterte yang mulai memfokuskan hubungan Filipina dengan Tiongkok serta menjauhkan diri dengan AS sebagai *traditional partner*. Pada bab ini juga akan disajikan penelitian terdahulu sebagai pedoman penelitian penulis, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian.

### **1.1 Latar Belakang**

Laut Tiongkok Selatan ialah laut yang terletak pada kawasan Samudera Pasifik. Wilayah laut ini meliputi ratusan pulau kecil serta karang-karang. Menurut letak geografisnya, Laut Tiongkok Selatan terbentang dari Selat Formosa di wilayah Taiwan, hingga Selat Malaka di barat daya tepatnya wilayah perbatasan antara Malaysia dan Indonesia. Berdasarkan United Nations Convention on Law of the Sea (UNCLOS) yang diadopsi pada tahun 1982, setiap negara yang berbatasan memiliki hak wilayah sampai dengan 12 mil laut serta Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sepanjang 200 mil sebagai bagian dari kedaulatannya (Iswardani, 2015).

Laut Tiongkok Selatan terdiri dari enam kelompok pulau diantaranya, Pratas Islands, Macclesfield Bank, Paracel Islands, Scarborough Shoal, Spratly Islands dan Natuna Islands. Dari keenam kelompok pulau tersebut dua diantaranya yakni Paracel dan Spratly yang merupakan wilayah sengketa. Paracel Island terdiri dari sekitar 130 fitur. Kepulauan ini terletak kira-kira 115-150 mil dari garis pantai Vietnam dan Pulau Hainan di Tiongkok (Sacks, 2022). Wilayah ini diklaim oleh Tiongkok, Taiwan dan Vietnam. Sedangkan, Spratly Islands meliputi sepanjang

tepi Laut Tiongkok Selatan yang berada dalam ZEE beberapa negara yakni Brunei Darussalam, Malaysia dan Filipina. Wilayah ini terdiri lebih dari 100 fitur yang tersebar di 158.000 mil persegi dari Laut Tiongkok Selatan (Sacks, 2022).

Kawasan Laut Tiongkok Selatan merupakan satu dari sekian banyak perairan terpenting dalam dunia perdagangan global. Kurang lebih sepertiga perdagangan maritim global dengan total perkiraan \$3,37 triliun pada tahun 2016 melewati kawasan tersebut (Sacks, 2022). Menurut perkiraan US Geological Survey (USGS) enam puluh persen hidrokarbon di Laut Tiongkok Selatan adalah gas alam. Terdapat spekulasi bahwa Spratly Island bisa menjadi provinsi penghasil minyak karena wilayah tersebut mengandung sumber minyak yang cukup besar. Sebagian besar bidang gas hidrokarbon dieksplorasi di daerah sekitar Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam (Iswardani, 2015). Potensi tersebut membuat kawasan ini semakin diminati negara lain yang ikut terlibat dalam sengketa. Selain itu, letak geografis dan geostrategis Laut Tiongkok Selatan menimbulkan dilema keamanan bagi wilayah kawasan Asia Timur hingga Asia Pasifik.



Gambar 1. 1 Laut Tiongkok Selatan  
Sumber : Nations Online | One World Map

Sejak 2008, ketegangan sengketa di Laut Tiongkok Selatan meningkat setelah berkembangnya tindakan asertif Tiongkok. Diantaranya, pembangunan pulau buatan yang dilengkapi dengan sistem pertahanan, aktivitas penangkapan ikan secara ilegal di ZEE Vietnam, Malaysia dan Filipina, serta penolakan Tiongkok terhadap putusan Pengadilan Arbitrase (The Arbitral Tribunal of the Permanent Court of Arbitration) pada Juli 2016. Hal ini diperparah dengan sikap Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) sebagai organisasi regional di kawasan Asia Tenggara yang tidak berupaya tegas dalam menyuarkan tuntutan dari negara-negara anggotanya yang bersengketa (York, 2015). Diantara negara-negara Asia Tenggara yang terlibat, Filipina merupakan negara yang paling giat melakukan penentangan terhadap Tiongkok. Dalam hal ini, Filipina mengklaim bagian timur laut Spratly Island sebagai kelompok Pulau Kalayaan, serta Scarborough Shoal, yang disebut Bajo de Masinloc. Filipina mengklaim kelompok Pulau Kalayaan dengan asumsi bahwa wilayah tersebut merupakan wilayah peninggalan Jepang. Sehingga pada tahun 1978, pemerintahan Presiden Ferdinand Marcos mengeluarkan dekrit yang mencantumkan tiga dasar hak sah Filipina atas wilayah tersebut, diantaranya, kedekatan dengan kepulauan Filipina, kepemilikan sejarah, dan pencabutan klaim pihak lain. Disusul dengan pengesahan undang-undang legislatif pada bulan Maret 2009 untuk menyesuaikan garis pangkal Filipina dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982 (UNCLOS) (The National Bureau of Asian Research, 2023).

Namun, dalam menuntut klaim atas wilayah sengketa, Filipina mengalami gejolak perbedaan pandangan politik dalam pemerintahannya. Dalam kepemimpinan Benigno Aquino III pada tahun 2010 hingga 2016, Filipina menentang Tiongkok dengan membawa klaim sengketa ke pengadilan internasional. Aquino juga melakukan aliansi yang lebih dekat dengan Amerika Serikat (AS) dengan membeli peralatan militer serta meminta jaminan keamanan seperti yang tertera pada Mutual Defense Treaty (MDT) pada tahun 1951 serta Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA) pada tahun 2014 (Winston, 2020). Aliansi antara Filipina dan AS sudah lama dilakukan sejak Filipina memperoleh kemerdekaan dari AS pada tahun 1946. Aliansi tersebut menjadikan Filipina sebagai basis proyeksi kekuatan AS di Asia. Bahkan kehadiran militer AS

dalam urusan dalam negeri Filipina juga tersedia pada masa kediktatoran Presiden Ferdinand Marcos yang menjabat selama 30 tahun. Hal tersebut menjadikan AS dikenal sebagai *traditional partner* Filipina.

Di sisi lain, Rodrigo R. Duterte justru memulai masa kepemimpinannya di tahun 2016 hingga 2022 dengan menggeser kebijakan luar negeri Filipina untuk menjadi lebih bersahabat dengan Tiongkok serta menjauhkan diri dari aliansi tradisionalnya yakni Amerika Serikat. Duterte mengungkapkan bahwa AS bukan lagi *partner* ekonomi serta militer Filipina. Kebijakan tersebut membuat Philippine Navy (PN) tidak lagi melakukan patroli militer dengan Angkatan Laut AS di Laut Tiongkok Selatan. Ia bahkan menginginkan AS menarik Pasukan Operasi Khusus yang mendukung misi kontra-terorisme di Mindanao (Castro, 2018a). Kebijakan mengenai pemisahan aliansi tersebut disebutkan dengan beberapa narasi Duterte mengenai *anti-colonialism* yang ditujukan terhadap AS. Sedangkan dalam hubungannya dengan Tiongkok, Duterte mengutamakan pembangunan infrastruktur lewat bantuan program investasi *Belt and Road Initiatives* yang digalangkan oleh Tiongkok sejak tahun 2014 (Castro, 2019). Pembangunan infrastruktur tersebut memproyeksikan terhubungnya pasar Asia serta Eropa lewat jalur perdagangan.

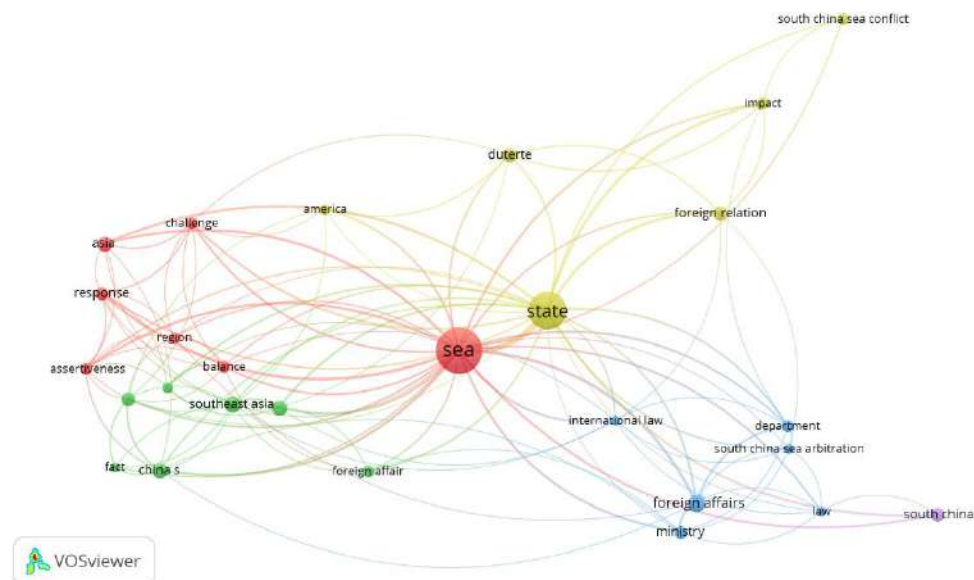
Dilihat dari dua kebijakan yang ada, terjadi transisi antara kepemimpinan Aquino yang memusatkan kebijakan luar negerinya terhadap AS namun dengan tiba-tiba digantikan dengan kebijakan independen milik Duterte yang justru ingin menjauh dengan AS. Dalam hal ini penulis melihat adanya kesenjangan yang terjadi pada kebijakan Rodrigo Duterte terhadap kebijakan dari presiden sebelumnya, Benigno Aquino III. Sehingga penelitian ini akan difokuskan pada faktor-faktor apa saja yang berpengaruh pada perubahan kebijakan luar negeri Filipina pada tahun 2016. Pemusatan arah penelitian tersebut dilakukan atas beberapa alasan. Pertama, penulis melihat bahwa kebijakan tersebut justru bertolak belakang dengan situasi Filipina yang sedang bersengketa dengan Tiongkok. Kedua, penulis menilai bahwa kebijakan tersebut bisa saja digunakan Tiongkok sebagai jebakan atas bantuan pendanaan infrastruktur serta investasi yang diberikan. Sehingga, dalam hal ini tindakan asertif yang telah dilakukan oleh Tiongkok di wilayah perairan Filipina tidak dapat digugat.

Isu ini menjadi penting dan layak untuk diteliti oleh penulis dengan beberapa alasan. Pertama, terdapat kesenjangan, meminjam teori *Balance of Threats*, idealnya negara melakukan aliansi dengan negara lain untuk mengimbangi ancaman (Walt, 2000). Di sisi lain, Filipina justru mendekati diri dengan Tiongkok. Kedua, lewat penelitian ini, dapat terlihat bagaimana perumusan kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh *small states* dalam menghadapi ancaman dari *great power*. Ketiga, penulis melihat bahwa Pemerintah Filipina justru lebih mementingkan pembangunan ekonomi lewat bantuan yang diberikan oleh Tiongkok dibanding mementingkan isu sengketa teritorial yang justru sedang berlangsung.

Dalam rangka memperkuat penelitian ini, penulis memaparkan penelitian terdahulu dengan topik serupa. Penelitian terdahulu berguna sebagai pedoman penulis dalam memetakan penelitian, termasuk dalam mencari konsep dan teori. Pada dasarnya, penelitian mengenai perubahan kebijakan luar negeri Filipina dalam upaya strategis penyelesaian sengketa Laut Tiongkok Selatan sudah banyak dilakukan. Namun, dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori lain yang berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Meskipun demikian, terdapat beberapa penelitian yang memiliki kesamaan serta bersinggungan dengan topik yang penulis angkat. Penelitian-penelitian lainnya, antara lain menekankan pada, isu sengketa Laut Tiongkok Selatan secara umum (Gao & Jia, 2013; Geib & Pfaff, 2016; Raymond & Welch, 2022), Hubungan Filipina dan Tiongkok (Velasco, 2014; Woods, 2016), strategi Filipina terhadap Tiongkok (Imanuddin & Sugito, 2021; Bao & Thao, 2023), arbitrase Laut Tiongkok Selatan (Zhang (张 锋), 2017; Zhao, 2018), hubungan AS dan Tiongkok terhadap Laut Tiongkok Selatan (Fravel & Miura, 2020).

Untuk membuktikan *novelty* atau kebaruan penelitian, penelitian ini menggunakan analisis bibliometrik sebagai metode analisis dari artikel yang penulis temukan. Analisis bibliometrik memungkinkan penulis untuk melakukan analisis metadata seperti kata kunci ataupun abstrak dari buku, jurnal, atau kumpulan data menggunakan statistik dalam rangka menggambarkan relasi antardata yang dikumpulkan (Ninkov dkk., 2022). Dalam hal ini, penulis menggunakan dua perangkat lunak yaitu *Publish or Perish* untuk mengumpulkan

metadata serta *VosViewer* untuk memetakan penelitian. Penulis menggunakan kata kunci berupa *philippine shifting policy*, *united state*, *china*, *philippine foreign policy*, dan *south china sea* ke dalam *Publish or Perish* yang kemudian memunculkan kumpulan artikel yang berkaitan. Selanjutnya, penulis memasukkan kumpulan data tersebut ke dalam *VosViewer*. Dari hasil pemetaan yang dilakukan oleh *Vosviewer*, penulis melihat bahwa penelitian yang secara spesifik berfokus pada perubahan kebijakan luar negeri Filipina dalam upaya penyelesaian sengketa Laut Tiongkok Selatan dengan teori perubahan kebijakan luar negeri belum banyak dilakukan. Sehingga penulis mengangkat topik tersebut sebagai penelitian. Berikut merupakan hasil dari pemetaan menggunakan *VosViewer* (lihat gambar 1.2).



Gambar 1. 2 Analisis VosViewer

Sumber : Dianalisis oleh penulis

Penelitian pertama merupakan penelitian yang dilakukan oleh Fernan Talamayan (Talamayan, 2022). Penelitian ini bertujuan untuk meninjau ulang kebijakan poros terhadap Tiongkok dan Rusia yang dilakukan oleh Filipina di bawah kepemimpinan Rodrigo Duterte. Dengan menggunakan metode kualitatif dengan analisis eksplanatif, penelitian ini mengkritisi beberapa narasi yang dipaparkan oleh Duterte selama masa kepemimpinannya, diantaranya, narasi anti



kolonial, perang terhadap penyebaran narkoba, keinginan untuk meningkatkan infrastruktur, hingga pengelolaan konflik Laut Tiongkok Selatan. Penelitian ini juga menjelaskan kembali alasan dibalik perubahan kebijakan Duterte serta pengaruhnya terhadap AS sebagai *traditional partner*. Lewat analisis tersebut, peneliti menemukan bahwa kebijakan yang dilakukan oleh Duterte tidak sesuai terhadap tujuan yang ingin dicapai oleh Duterte. Sehingga dalam hal ini Duterte mengkalibrasi kembali kebijakan tersebut sebelum meninggalkan jabatannya.

Penelitian kedua merupakan penelitian yang dilakukan oleh Renato Cruz De Castro (Castro, 2017). Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji perubahan yang terjadi pada kebijakan luar negeri Filipina pada masa pemerintahan Duterte terhadap AS dan Tiongkok. Dengan menggunakan metode kualitatif, peneliti mempertanyakan agenda politik yang dilakukan oleh Duterte. Dalam hal ini, peneliti memaparkan bahwa Duterte menggunakan strategi *equi-balancing* sebagai strategi diplomatik yang biasa dilakukan oleh *small states* dengan negara yang memiliki kekuatan besar. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan gambaran bahwa strategi *equi-balancing* digunakan oleh Filipina untuk menyeimbangkan Tiongkok dan AS. Namun, alih-alih melakukan hubungan kemitraan yang baik dengan AS, Filipina justru memilih melakukan hubungan kemitraan dengan Jepang sebagai penyeimbang kekuatan Tiongkok.

Penelitian ketiga merupakan penelitian yang dilakukan oleh Jenny D. Balboa (J. Balboa, 2020). Penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak kebijakan poros Filipina terhadap Tiongkok lewat sudut pandang ekonomi. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan analisis komparatif. Penelitian ini memaparkan dampak ekonomi yang dihasilkan dengan memaparkan perbandingan total ekspor impor terhadap negara lain seperti AS, Jepang dan Rusia. Peneliti juga memaparkan perbandingan *Foreign Direct Investment* yang masuk ke Filipina lewat Tiongkok dengan negara ASEAN lainnya.

Penelitian keempat merupakan penelitian yang dilakukan oleh Aileen Baviera (Baviera, 2016). Penelitian ini berfokus pada tantangan yang dialami oleh Filipina di bawah kepemimpinan Rodrigo Duterte dalam membangun hubungan yang baik dengan Tiongkok setelah bertahun-tahun Filipina beraliansi dengan AS. Peneliti juga memaparkan tantangan yang dialami oleh Duterte untuk menentukan

peran apa yang harus dimainkan oleh aliansi keamanan Filipina dengan AS. Peneliti menggunakan analisis kualitatif sebagai metode penelitian.

Penelitian kelima merupakan penelitian yang dilakukan oleh Bruno Hendler (Hendler, 2018). Penelitian ini bertujuan untuk memahami 'poros ke Tiongkok' yang terkenal dari presiden Filipina Rodrigo Duterte dan skenario yang dapat dihasilkan dalam menyelesaikan konflik Laut Tiongkok Selatan. Peneliti menggunakan teori hubungan asimetris serta metode kualitatif deskriptif dalam menjelaskan hubungan yang tidak setara antara Filipina, AS dan Tiongkok. Peneliti juga memaparkan pelbagai indikator ekonomi dan politik dari pergeseran kebijakan luar negeri Filipina di bawah Duterte. Selanjutnya peneliti mengusulkan model teoritis untuk mengidentifikasi keterkaitan antara elemen ekonomi politik dan keamanan internasional dari perspektif teori asimetri.

Penelitian-penelitian tersebut memiliki persamaan serta perbedaan dengan penelitian ini. Penelitian yang penulis teliti memiliki kesamaan berupa topik yang dipaparkan yakni mengenai perubahan kebijakan luar negeri Filipina yang cenderung dekat dengan Tiongkok. Meskipun demikian, penelitian ini menggunakan teori atau pendekatan lain sebagai pembeda dari penelitian-penelitian sebelumnya. Selanjutnya, penelitian ini juga akan memaparkan data terbaru mengenai upaya strategis penyelesaian sengketa Laut Tiongkok Selatan dalam rangka mencapai kebaruan data.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Penulis menyoroti transisi kebijakan yang dilakukan oleh Filipina di bawah kepemimpinan Rodrigo Duterte di tahun 2016. Idealnya, negara akan mengimbangi ancaman dengan melakukan aliansi dengan negara lain. Namun, Filipina cenderung menjauhi AS sebagai *traditional partner*. Sehingga, perubahan kebijakan luar negeri Filipina pada pemerintahan Rodrigo Duterte bertolak belakang pada situasi Filipina yang sedang terancam dalam isu sengketa kedaulatan dengan Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan. Selain itu, Filipina melakukan perjanjian kerjasama ekonomi dengan Tiongkok lewat program *Belt and Road Initiatives* di tengah tindakan asertif Tiongkok di ZEE Filipina. Beberapa peristiwa tersebut menimbulkan pertanyaan bagi penulis terkait **Apa saja faktor penyebab**

**perubahan kebijakan luar negeri Filipina dalam upaya strategis penyelesaian konflik Laut Tiongkok Selatan?** Dalam hal ini, penulis ingin melihat proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh *small states* khususnya Filipina dalam mengambil keputusan strategis terhadap *great powers*. Serta faktor faktor yang mempengaruhi perubahan kebijakan Rodrigo Duterte pada tahun 2016.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk :

- 1) Menjelaskan upaya strategis Filipina dalam penyelesaian sengketa Laut Tiongkok Selatan; dan
- 2) Menjelaskan perubahan kebijakan luar negeri Filipina dalam upaya strategis penyelesaian sengketa Laut Tiongkok Selatan di tahun 2016 hingga 2022.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Manfaat Akademis: Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan andil dalam kajian ilmu Hubungan Internasional, terutama pada kajian kebijakan luar negeri.
- 2) Manfaat Praktis: Penulis juga berharap penelitian ini dapat berguna untuk penulis lainnya dalam menulis penelitian dengan topik serupa.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini terdiri atas dua bagian. Bagian pertama berupa konsep kebijakan luar negeri, konsep sengketa teritorial, konsep *hedging*, serta teori perubahan kebijakan luar negeri yang akan dijelaskan pada bagian landasan konseptual. Adapun bagian kedua memaparkan kerangka pemikiran berupa alur penelitian penulis. Penulis menggunakan kerangka penelitian sebagai pedoman dalam menjelaskan perubahan kebijakan luar negeri Filipina dalam upaya strategis penyelesaian sengketa Laut Tiongkok Selatan.

#### **2.1 Landasan Konseptual**

Bagian ini menjelaskan konsep serta teori yang penulis gunakan dalam penelitian. Penulis menggunakan konsep kebijakan luar negeri dalam rangka memahami kebijakan luar negeri yang dikeluarkan oleh seorang kepala negara yakni dalam hal ini presiden Filipina. Penulis juga menjabarkan konsep sengketa teritorial dalam menjelaskan sengketa yang terjadi di wilayah teritorial Filipina. Konsep *hedging* juga digunakan dalam memahami upaya strategis Filipina sebagai *small states* dalam menyelesaikan sengketa dengan *great power*. Penulis menggunakan teori perubahan kebijakan luar negeri dalam menjelaskan sumber-sumber yang berpengaruh terhadap perubahan kebijakan luar negeri Filipina.

##### **2.1.1. Konsep Kebijakan Luar Negeri**

Merujuk pemaparan Bojang As, kebijakan luar negeri dipahami sebagai visi yang diinginkan oleh negara dalam melakukan hubungan dengan negara lain atau aktor lain (As, 2018). Dalam tulisannya, ia memaparkan bahwa terdapat komponen eksternal yang merupakan salah satu komponen esensial dalam membentuk suatu kebijakan luar negeri.

Komponen tersebut diantaranya, sistem internasional, aliansi, perlombaan senjata, serta organisasi internasional. Di sisi lain, ia juga memaparkan komponen internal yang juga penting dalam membentuk suatu kebijakan luar negeri diantaranya, sejarah, geografi, perkembangan ekonomi, kapabilitas militer, sistem politik, partai politik, karakter kepala negara, tekanan dan opini publik serta teknologi (As, 2018).

Valerie M. Hudson juga menjelaskan bahwa kebijakan luar negeri merupakan strategi pemerintah untuk mencapai tujuan dalam hubungannya dengan pihak eksternal (Hudson, 2016). Kebijakan tersebut dilakukan dalam lingkungan internal dan internasional yang kompleks yang mana merupakan hasil dari koalisi aktor dan kelompok aktif yang terletak di dalam lingkup domestik dan internasional. Kebijakan luar negeri biasanya bersumber dari isu-isu politik domestik dan internasional yang dalam prosesnya melibatkan proses tawar-menawar dan kompromi yang memengaruhi kepentingan kelompok domestik dan internasional (Carlnaes, 2016).

Di sisi lain terdapat analisis lain seperti kebijakan luar negeri ialah pernyataan serta tindakan yang diambil oleh suatu negara atas hubungannya dengan negara lain (Dugis, 2008). Tindakan responsif atas tindakan negara lain dilakukan supaya negara mencapai kepentingan nasional di luar wilayah kedaulatan. Sehingga, dalam hal ini kebijakan luar negeri mencerminkan sebuah kepentingan nasional suatu negara.

Pada kasus Filipina sendiri, perumusan kebijakan luar negeri Filipina telah diatur dalam Konstitusi Filipina tahun 1987 terkait penyusunan kebijakan luar negeri (Official Gazette of the Republic of the Philippines, 2024). Di dalam aturan tersebut disebutkan bahwa Filipina menolak perang sebagai instrumen kebijakan nasional, mengadopsi prinsip-prinsip hukum internasional yang diterima secara umum sebagai bagian dari hukum negara dan mematuhi kebijakan perdamaian, kesetaraan, dan keadilan. Dijelaskan juga bahwa Negara harus menjalankan politik luar negeri yang independen. Dalam hubungannya dengan negara-negara lain, pertimbangan terpenting adalah kedaulatan nasional, integritas wilayah,

kepentingan nasional, dan hak untuk menentukan nasib sendiri. Selain pada aturan tersebut, Undang-Undang Republik No. 7157 atau dikenal sebagai Undang-Undang Dinas Luar Negeri Filipina tahun 1991, memberikan mandat kepada Departemen Luar Negeri untuk melaksanakan tiga (3) pilar kebijakan luar negeri Filipina, diantaranya; pelestarian dan peningkatan keamanan nasional, promosi dan pencapaian keamanan ekonomi, serta perlindungan hak dan promosi kesejahteraan dan kepentingan warga Filipina di luar negeri. Ketiga pilar ini saling berkaitan satu dengan yang lain.

Dalam penelitian ini, konsep kebijakan luar negeri digunakan penulis dalam memandang kebijakan luar negeri Filipina. Penulis berupaya memahami kebijakan luar negeri Filipina dalam dua kepemimpinan yang berbeda. Yang mana keduanya memiliki visi, strategi, serta tindakan responsif yang berbeda. Di sisi lain, penulis juga menggunakan konsep kebijakan luar negeri dalam melihat kapabilitas Filipina dalam menghadapi Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan. Yang mana terlihat dari tindakan Presiden Rodrigo Duterte yang tidak menggunakan hasil putusan pengadilan arbitrase dalam menghadapi Tiongkok (Castro, 2022).

### **2.1.2. Konsep Sengketa Teritorial**

Sengketa dapat dimaknai sebagai ketidaksepakatan antarpihak yang mana pihak tersebut merupakan pemerintah, lembaga, maupun badan hukum (Merrills, 2005). Sementara itu, yang dimaksud dengan sengketa teritorial adalah perselisihan atas sebidang wilayah atau perairan yang lebih luas yang diklaim oleh dua atau lebih negara merdeka. Lebih khusus lagi, sengketa teritorial terjadi antara dua negara atau lebih ketika setidaknya satu pemerintah tidak menerima definisi di mana garis batas perbatasannya dengan negara lain saat ini berada, sedangkan pemerintah tetangga mengambil posisi bahwa garis batas adalah batas yang sah antara kedua negara berdasarkan perjanjian atau dokumen yang ditandatangani sebelumnya (Guo, 2011).

Sengketa teritorial bisa bersumber dari beberapa hal seperti misalnya klaim sejarah maupun kompetisi sumber daya alam. Sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya air dan mineral (terutama minyak bumi), perikanan, dan lahan subur. Namun, dalam melihat penyebab dari sengketa kita tidak bisa dilihat dari satu penyebab. Sengketa teritorial yang terjadi dengan menggunakan kekerasan memiliki beberapa penyebab. Dalam keadaan tertentu, kebutuhan akan sumber daya tercampur dengan persaingan geopolitik dan hubungan kekuasaan antar negara. Intensitas dari setiap sengketa bervariasi tiap kasusnya. Beberapa kasus berintensitas rendah terjadi karena salah satu pihak cenderung menghindari dari adanya konflik dengan negara lain. Namun, beberapa kasus memiliki intensitas yang cukup tinggi dengan menggunakan militer atau kekerasan. Dalam beberapa kasus hal tersebut diselesaikan dengan perjanjian bilateral atau arbitrase internasional (Guo, 2011). Seperti yang dijelaskan pada Resolusi Majelis Umum tahun 1970 Pasal 2 Ayat 3 bahwa penyelesaian perdamaian dapat dilakukan dengan mediasi, konsiliasi, arbitrase, serta penyelesaian secara yudisial.

Pada kasus ini, Filipina mengklaim wilayah Bajo de Mansiloc yang terletak kira-kira pada garis lintang  $15^{\circ}08'LU$  dan garis bujur  $117^{\circ}45'BT$ , merupakan sebuah atol terumbu dan bebatuan yang terletak sekitar 124 mil laut dari pantai terdekat pulau Luzon di Filipina dan sekitar 472 mil laut dari pantai terdekat Pulau Luzon di Filipina. Dikenal dengan nama lain Scarborough Shoal, wilayah ini terletak di bagian utara Pulau Spratly. Hak kedaulatan dan yurisdiksi yang ditegaskan oleh Filipina atas hak maritim atas fitur-fitur di Bajo de Masinloc didasarkan pada prinsip-prinsip umum hukum internasional yang konsisten dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS). Wilayah ini penting bagi nelayan Filipina dengan potensi keuntungan sebesar 5.021 metrik ton setiap tahunnya. Hal ini tentu berpengaruh terhadap sumber mata pencarian masyarakat Filipina. Bagi Tiongkok, kepentingan strategis Bajo de Masinloc terletak pada peran pentingnya sebagai titik tumpu dalam klaimnya atas Laut Tiongkok Selatan (Bautista, 2013).

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan konsep sengketa teritorial sebagai acuan dalam memahami sengketa yang terjadi di Laut Tiongkok Selatan. Penulis juga menggunakan konsep ini dalam melihat bagaimana upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Presiden Rodrigo Duterte dalam menghadapi sengketa dengan negara lain di dalam kawasan yang sama. Selain itu, konsep ini juga digunakan penulis dalam melihat intensitas konflik yang terjadi akibat sengketa yang tengah berlangsung.

### **2.1.3. Konsep *Hedging***

Dalam teori *balance of power*, *balancing* dan *bandwagoning* merupakan indikasi dasar dari sikap strategi suatu negara. Kedua jenis konsep sikap strategis negara tersebut mendikte perilaku negara, yang seringkali sulit diidentifikasi karena pada kenyataannya perilaku negara lebih kompleks (Koga, 2018). Oleh karena itu, para sarjana mengusulkan konsep alternatif dalam melihat strategi suatu negara. Konsep alternatif tersebut disebut sebagai konsep *hedging*. Di antara konsep-konsep ini, *hedging* telah menarik perhatian khusus dan perhatian ilmiah dalam literatur karena konsep ini tampaknya secara efektif menjelaskan perilaku suatu negara dalam menghadapi ancaman. Melalui *hedging*, negara melakukan *counteracting policy* dengan memperkuat kerja sama ekonomi sambil mempersiapkan konfrontasi diplomatik dan militer lewat kemampuan militer. Hal tersebut dilakukan sebagai cara untuk menghindari konfrontasi eksplisit pada negara yang berkonflik (Koga, 2018). Dalam ilmu hubungan internasional, konsep ini jarang digunakan dalam literatur-literatur. Konsep ini justru sering muncul dalam literatur yang berkaitan dengan aliansi. *Hedging* mengacu pada upaya suatu negara terutama *small states* untuk melakukan hubungan baik dengan sekutu dengan kepentingan-kepentingan tertentu. Stiles mendefinisikan *hedging* sebagai sebuah kebijakan yang mana fleksibilitas suatu negara terhadap komitmen hubungan dengan suatu negara ditingkatkan. Sehingga, hal tersebut memungkinkan negara untuk



bertindak di luar dari komitmen hubungan yang ada walaupun tindakan tersebut harus dilakukan terhadap negara *partner* (Stiles, 2018).

Dengan demikian, *hedging* merupakan strategi yang umum bagi sebuah negara yang berkomitmen dalam perjanjian substansial tetapi juga ingin melindungi diri dari komitmen yang terlalu terbuka atau permanen. Hal tersebut biasanya berangkat dari ketidakpastian suatu hubungan antar aktor atau negara (Stiles, 2018). Konsep ini pertama kali dijelaskan oleh Cheng Chwee Kuik. Dalam artikelnya, Kuik menjelaskan konsep *hedging* yang digunakan untuk menjelaskan perilaku negara-negara di Asia Tenggara terhadap rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok. Kuik menggambarkan *hedging* sebagai konsep yang berada diantara dua bagian strategi yakni *balancing* dan *bandwagoning*. Bagian tersebut dihitung dari tingkat penerimaan (*power acceptance*) dan penolakan (*power rejection*) dari *small states* terhadap *great powers* seperti Amerika Serikat dan Tiongkok. Yang mana *pure balancing* mewakili tingkat maksimum dari *power rejection* dan *pure bandwagoning* mewakili tingkat maksimum dari *power acceptance* (Kuik, 2008). Diantara dua bagian tersebut, terdapat *hedging* dengan beberapa komponen penyusunnya seperti; ikatan perjanjian (*binding engagement*), penolakan dominasi (*dominance denial*), bandwagon terbatas (*limited bandwagoning*), pragmatism ekonomi (*economic pragmatism*), dan balance tidak langsung (*indirect balancing*). Selanjutnya, Kuik mengelompokkan komponen-komponen tersebut menjadi dua bagian yakni *risk contingency options* serta *return maximazing options* (Kuik, 2008). Seperti yang diilustrasikan oleh Kuik pada Tabel 2.1.

Countries	Balancing Strategy (Pure form)	Hedging Strategy					Bandwagoning Strategy (Pure form)
		Risk-Contingency Options		Return-Maximizing Options			
		Indirect-Balancing	Dominance-Denial	Economic-Pragmatism	Binding-Engagement	Limited-Bandwagoning	
Malaysia							
Singapore							
Thailand							
Indonesia							

**Key:**

	Full adoption
	Partial adoption

Tabel 2. 1 Strategi Negara-Negara di Asia Tenggara terhadap Tiongkok (Kuik, 2008)

Pada dasarnya, *hedging* digunakan negara atau aktor rasional untuk mendapatkan jaminan dari ketidakpastian yang tinggi (Kuik, 2021). Amerika Serikat dan Tiongkok merupakan target *hedging* dari negara-negara kecil seperti di Asia Tenggara. Negara yang biasa disebut sebagai *small states* melakukan strategi *hedging* dengan menggambarkan strategi mereka sebagai netral ataupun *non-aligned*. Hal tersebut merujuk pada rivalitas AS dan Tiongkok di kawasan Asia Tenggara. Terlepas dari itu, *small states* melakukan *hedging* dalam pelbagai macam cara. *Hedging* menjadi semakin penting dalam konteks regional Asia Tenggara, di mana *small states* termasuk Filipina dihadapkan pada lingkungan keamanan yang tidak stabil dan adanya persaingan di antara kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan Tiongkok. Sehingga, negara-negara Asia Tenggara harus menggunakan *hedging* sebagai strategi yang tepat dalam menghadapi dinamika keamanan yang kompleks.

#### 2.1.4. Teori Perubahan Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri ialah keputusan absolut yang diputuskan oleh pejabat berwenang dalam mempertahankan aspek yang diinginkan atau mengubah aspek yang tidak diinginkan dari lingkungan eksternal (Dugis, 2008). Kebijakan luar negeri bukan merupakan sesuatu yang statis, melainkan dapat berubah seiring dengan kebutuhan negara untuk mencapai

tujuannya. Secara umum, perubahan kebijakan luar negeri memiliki sebab yang bervariasi. Sebab pertama timbul oleh adanya reformasi negara. Sebab kedua timbul oleh adanya orientasi kebijakan luar negeri yang berbeda dari sebelumnya. Pada jenis perubahan yang kedua sifat perubahannya lebih kepada negara yang melakukan *self-correcting* (Dugis, 2008).

Selanjutnya, dalam penelitian ini penulis menggunakan teori yang diuraikan oleh Charless F. Hermann sebagai kerangka analitis utama (Hermann, 1990). Hermann memaparkan bahwa terdapat beberapa level perubahan, di antaranya:

1. *Adjustment Changes*

Perubahan ini terjadi ketika kebijakan yang dilakukan, cara kebijakan tersebut dilakukan, serta arah tujuan kebijakan tidak berubah. Namun level usaha dari tujuan tersebut yang berubah.

2. *Program Changes*

Terjadi ketika perubahan melibatkan instrument baru dalam sebuah kebijakan. Sehingga, kebijakan yang dilakukan serta cara kebijakan tersebut dilakukan berubah namun tujuannya tetap tidak berubah.

3. *Problem or Goal Changes*

Mengacu pada situasi dimana tujuan dari kebijakan diganti atau dihilangkan.

4. *International Orientation Changes*

Melibatkan perubahan arah kebijakan terhadap seluruh negara di dunia termasuk karakter serta aktivitas eksternalnya dengan negara lain. Pada level ini terjadi perubahan mulai dari kebijakan, cara hingga tujuan kebijakan itu sendiri.

Sehingga, kebijakan luar negeri Filipina pada tahun 2016 diilustrasikan pada level perubahan program (*program changes*). Dalam hal ini, Filipina mengubah cara ataupun metode kebijakan luar negerinya

dengan mendekati diri kepada Tiongkok. Diikuti dengan kebijakannya untuk melepaskan ketergantungannya dengan AS. Selanjutnya, Hermann juga memaparkan beberapa pendekatan yang dapat menjelaskan faktor pengaruh perubahan kebijakan luar negeri, diantaranya, pendekatan mengenai sistem politik domestik (*domestic political system*), perumusan keputusan birokrasi (*bureaucratic decisionmaking*), *cybernetic (control theory)*, serta *learning approach*. Selanjutnya, ia juga menjelaskan beberapa sumber yang berpengaruh terhadap perubahan kebijakan luar negeri. Di antaranya:

1. *Leader Driven*

Hermann menjelaskan acap kali pejabat tertinggi yang berwenang terhadap kebijakan yakni presiden atau kepala negara memaksakan pandangannya untuk mengubah kebijakan. Artinya terjadi rekonseptualisasi antara persepsi masalah yang dihadapi dengan tujuan maupun cara yang digunakan. Dalam menjelaskan hal ini Hermann merekomendasikan penulis untuk menggunakan pendekatan *learning approaches*.

2. *Bureaucratic advocacy*

Para advokat atau pejabat tinggi pemerintahan dapat menjadi sumber yang berdampak pada perubahan kebijakan luar negeri suatu negara. Sebagai kelompok yang dekat dengan kepala pemerintahan, pejabat pejabat tersebut memiliki keuntungan lebih terhadap memahami situasi pemerintahan yang kemudian didiskusikan dengan kepala pemerintahan. Sehingga, pendekatan yang cocok dalam memaparkan bagian ini ialah pendekatan *bureaucratic decisionmaking*.

3. *Domestic restructuring*

Restrukturisasi domestik mengacu pada segmen masyarakat yang relevan secara politik yang dukungannya diperlukan oleh rezim untuk

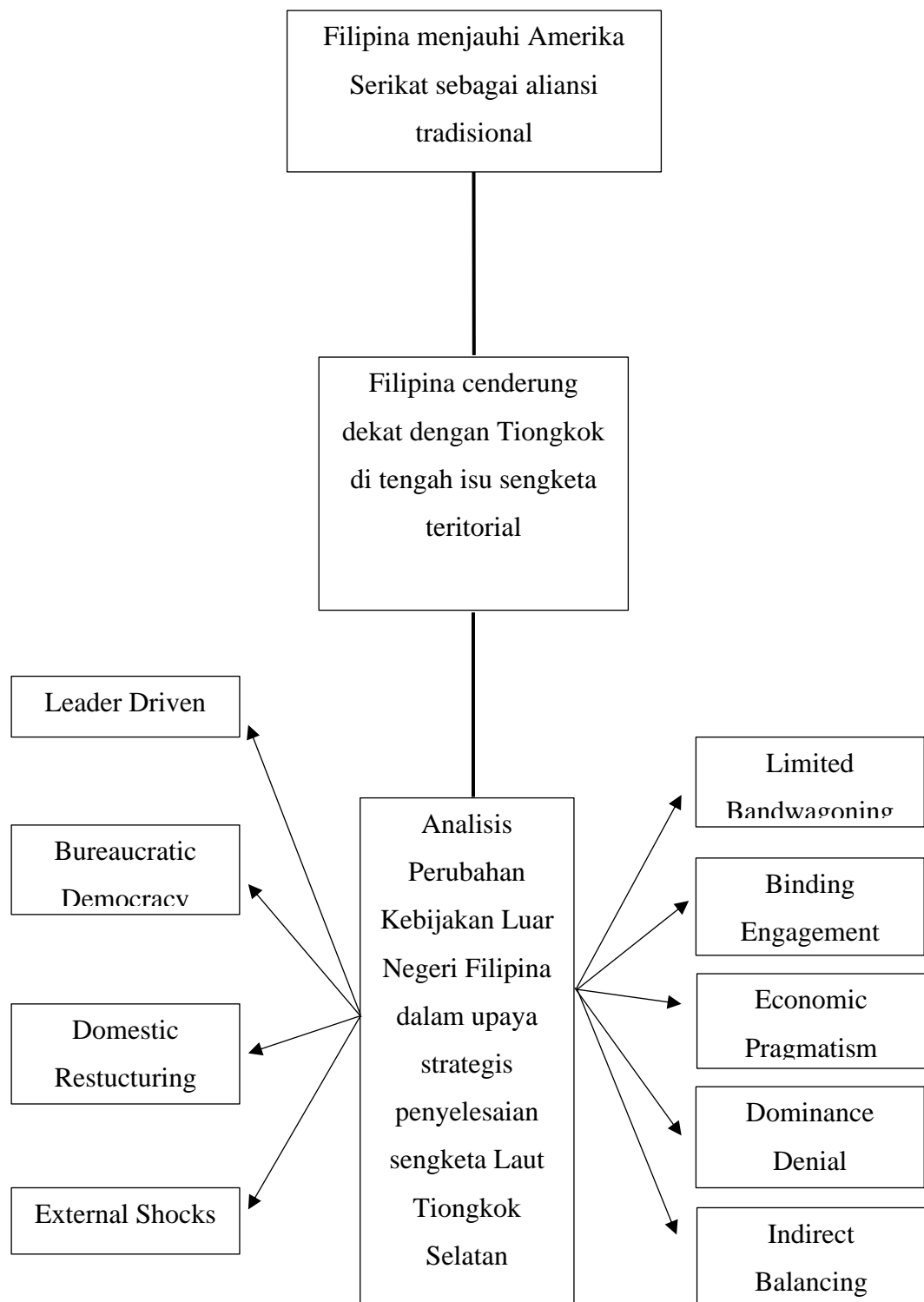
memerintah. Segmen masyarakat ini dapat menjadi agen perubahan. Dalam sistem politik yang berbeda, dinamika restrukturisasi domestik akan bervariasi, tetapi pada intinya pengalihan kebijakan luar negeri terjadi ketika elit dengan kekuasaan mengubah pandangan mereka untuk melegitimasi pemerintah.

#### 4. *External Shocks*

Guncangan eksternal adalah sumber perubahan kebijakan luar negeri yang ditimbulkan dari kejadian internasional yang dramatis. Dalam setiap kasus peristiwa besar memberikan kontribusi terhadap perubahan kebijakan luar negeri yang signifikan. Hermann memberikan rekomendasi untuk menggunakan pendekatan *cybernetic (control theory)* pada sumber perubahan ini.

Keempat sumber tersebut dapat menjadi penyebab bagi satu sumber ke sumber lainnya. Sehingga keempat sumber tersebut dapat berinteraksi bersama sama menjadi sumber perubahan kebijakan luar negeri.

## 2.2 Kerangka Pemikiran



Gambar 2. 2 Kerangka Pemikiran

\*Sumber : Diolah oleh penulis

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Bab ini memaparkan metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis. Bab ini terdiri dari enam bagian yakni, jenis penelitian, tingkat analisis penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data. Penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus penelitian pada perubahan kebijakan luar negeri Filipina dalam upaya strategis penyelesaian sengketa Laut Tiongkok Selatan. Penulis menggunakan sumber data sekunder yakni berupa dokumen resmi, buku, jurnal artikel, website resmi serta beberapa penelitian terdahulu yang sifatnya kredibel. Penulis mengumpulkan data dengan teknik studi pustaka yang kemudian penulis analisis dengan teknik reduksi data dengan mengorganisir data, kemudian memilah data tersebut dalam rangka menarik kesimpulan. Dalam menjamin validitas penelitian, penulis juga akan menggunakan teknik triangulasi data sehingga dapat tercapai pemahaman penelitian yang komprehensif.

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Dalam menyusun penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang berdasarkan pada fenomena-fenomena sosial. Pendekatan ini biasanya membahas makna individual dengan analisis data yang bersifat induktif dalam rangka mengeksplorasi fenomena yang ada (Creswell, 2013). Pendekatan kualitatif membantu peneliti untuk mendeskripsikan fenomena yang muncul dari penyebab perubahan sikap maupun perilaku Filipina terhadap sengketa Laut Tiongkok Selatan. Sehingga, hal tersebut mendukung penulis dalam menjawab pertanyaan penelitian mengenai perubahan kebijakan luar negeri Filipina dalam upaya strategis penyelesaian sengketa Laut Tiongkok Selatan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan alur induktif yang dimulai dari upaya strategis

penyelesaian sengketa Laut Tiongkok Selatan hingga faktor penyebab dari perubahan kebijakan luar negeri Filipina dalam upaya strategis penyelesaian sengketa laut Tiongkok Selatan.

### **3.2 Tingkat Analisis**

Dalam penelitian ini tingkat analisis yang penulis gunakan ialah pada tingkat negara. Selanjutnya, pada unit eksplanasi, penulis memfokuskan penelitian pada upaya strategis penyelesaian sengketa Laut Tiongkok Selatan. Pada bagian unit analisis penulis akan memfokuskan pada analisis perubahan kebijakan luar negeri Filipina dalam upaya strategis penyelesaian Laut Tiongkok Selatan.

### **3.3 Fokus Penelitian**

Fokus penulis dalam penelitian ini adalah melihat apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan Filipina dalam upaya strategis penyelesaian Laut Tiongkok Selatan. Walaupun kebijakan dikeluarkan pada tahun 2016, tidak menutup kemungkinan bahwa penulis menggunakan data penelitian sebelum tahun tersebut. Hal ini disebabkan oleh fokus penelitian penulis yang ingin mengetahui penyebab dari kebijakan tersebut. Di sisi lain penulis juga mendeskripsikan dinamika apa saja yang terjadi dalam hubungan Filipina, Tiongkok dan AS. Terutama yang berkaitan dengan upaya penyelesaian sengketa Laut Tiongkok Selatan. Dalam hal ini, penulis ingin melihat apakah ada upaya strategis yang dilakukan dalam penyelesaian sengketa Laut Tiongkok Selatan.

Selanjutnya, penulis juga menjelaskan sikap Filipina dalam mengambil keputusan. Dengan menggunakan teori perubahan kebijakan luar negeri, penulis menjelaskan faktor-faktor yang merupakan penyebab dari kebijakan luar negeri Filipina. Selain itu penulis juga akan menggunakan konsep *hedging* dalam menjelaskan upaya strategis yang dilakukan oleh Filipina dalam masa kepemimpinan Rodrigo Duterte dalam menyelesaikan sengketa Laut Tiongkok Selatan. Sehingga kedua pembahasan tersebut memenuhi tujuan penelitian penulis secara detail.



### 3.4 Jenis dan Sumber Data

Dalam mendukung penelitian ini, penulis menggunakan pelbagai sumber data yang terkait dengan topik penelitian. Dengan menggunakan sumber data sekunder, penulis memperoleh data lewat dokumen resmi, buku, jurnal artikel, website resmi serta beberapa penelitian terdahulu yang sifatnya kredibel. Seperti misalnya data mengenai kapabilitas militer penulis mengakses website resmi *Stockholm International Peace Research Institute* (SIPRI) yang diakses melalui <https://www.sipri.org/> serta *International Institute for Strategic Studies* (IIS) yang dapat diakses melalui <https://www.iiss.org/>.

Selain itu penulis juga mengakses beberapa website berita resmi seperti *The Diplomat* yang dapat diakses melalui <https://thediplomat.com/>, *The Guardian* yang dapat diakses melalui <https://www.theguardian.com/>, *Al-Jazeera* yang dapat diakses melalui <https://www.aljazeera.com/>, *The British Broadcasting Corporation* (BBC) yang dapat diakses melalui <https://www.bbc.com/> serta beberapa media lokal lainnya. Selanjutnya, dalam mengumpulkan data lewat artikel, buku, dan jurnal serta penelitian terdahulu lainnya penulis menggunakan data data dari *Center for Strategic International Studies* (CSIS), *Science Direct* yang dapat diakses melalui <https://www.sciencedirect.com>, *Taylor&Francis Online* yang dapat diakses melalui <https://www.tandfonline.com/>, serta beberapa website resmi milik pemerintah seperti *The Department of Finance* (DOF) yang dapat diakses melalui <https://www.dof.gov.ph/>, *Department of Foreign Affairs* yang dapat diakses melalui <https://dfa.gov.ph>, *Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China* yang dapat diakses melalui <https://www.mfa.gov.cn/eng>, serta *US Department of Defence* yang dapat diakses melalui <https://www.defense.gov>. Sumber data yang telah disebutkan dapat berubah seiring dengan kebutuhan penelitian.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Penulis mengumpulkan data melalui studi pustaka dalam rangka memperoleh sumber data seperti buku, artikel, laporan resmi, serta beberapa

penelitian terdahulu yang mendukung argumen penelitian. Beberapa sumber data tersebut akan diorganisir kembali menjadi data yang jelas dan padat sehingga mencegah adanya data yang tidak relevan dengan penelitian (Bryman, 2012). Data yang dikumpulkan juga akan divisualisasikan ke dalam tabel maupun gambar dalam rangka menunjang kebutuhan penelitian. Melalui studi pustaka, penulis dapat mengumpulkan data yang berkaitan dengan kebijakan luar negeri Filipina.

### **3.6 Teknik Analisis Data**

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan teknik reduksi data dengan mengorganisir pelbagai data yang penulis kumpulkan lewat pelbagai macam sumber (Bryman, 2012). Sumber yang penulis gunakan di antaranya dari situs resmi pemerintah Filipina, pemerintah Tiongkok, serta lembaga *think tank*. Setelah mengorganisir, penulis kemudian memilah data tersebut dalam rangka menarik kesimpulan. Dalam proses memilah data dari pelbagai macam sumber tersebut, penulis mengaitkan dengan konsep kebijakan luar negeri, konsep sengketa teritorial, konsep *hedging*, serta teori perubahan kebijakan luar negeri. Pada bagian ini penulis berupaya memperjelas dan memperkuat argument penulis. Kemudian hasil argumen dijelaskan dalam bentuk narasi yang jelas dan sederhana (Bryman, 2012). Di sisi lain, tidak hanya berpaku pada narasi, penulis juga menyajikan data statistik yang berkaitan dengan penelitian guna memperkuat argumen. Data tersebut penulis dapatkan dari jurnal artikel, situs resmi pemerintah, hingga lembaga survei yang menyajikan pelbagai data statistik.

Dalam menjamin validitas penelitian, penulis juga menggunakan teknik triangulasi data. Triangulasi data memungkinkan penulis untuk memeriksa kembali hubungan sebab akibat dari data yang penulis akan gunakan dalam penelitian. Data tersebut dapat berupa pernyataan formal, dokumen resmi, serta wawancara. Sehingga, data yang digunakan memiliki kredibilitas (Bryman, 2012). Dalam konteks penelitian ini, penulis menguji validitas data dari pelbagai sumber seperti situs resmi pemerintah Filipina, situs resmi pemerintah Tiongkok serta lembaga penelitian yang meneliti isu yang berkaitan.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini memaparkan simpulan dan saran dari hasil penelitian perubahan kebijakan luar negeri Filipina dalam upaya strategis penyelesaian sengketa Laut Tiongkok Selatan. Bagian pertama, penulis akan menjelaskan simpulan mengenai faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab perubahan kebijakan luar negeri Filipina pada tahun 2016–2022. Kemudian, pada akhir bab ini penulis akan menjelaskan saran yang berguna untuk penelitian selanjutnya.

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa perubahan kebijakan luar negeri Filipina dalam upaya strategis penyelesaian sengketa Laut Tiongkok Selatan pada tahun 2016–2022 terjadi oleh adanya supremasi yang kuat pada Presiden Duterte sebagai pengambil keputusan. Persepsi Duterte dalam melihat AS sebagai salah satu aliansi tertua Filipina yang bersikap netral pada sengketa dan Tiongkok sebagai partner ekonomi sekaligus ancaman membuat Duterte yakin bahwa Filipina harus mendekati Tiongkok dengan membuat kesepakatan dengan jalur perdamaian. Walaupun terdapat sentimen dari domestik dan birokrat yang tidak sepakat dengan kebijakan, Duterte tetap mempertahankan agenda politiknya bahkan hingga akhir masa jabatannya.

Berkenaan dengan teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini, penulis menemukan hanya dua faktor yang mendominasi dalam mendorong kebijakan independen milik Duterte. Faktor tersebut ialah *leader driven* serta *external shocks*. Pada faktor *leader driven*, penulis menemukan bahwa faktor ini cenderung melihat faktor psikologi maupun persepsi seorang pengambil keputusan. Duterte melihat bahwa ada peluang dari Tiongkok untuk bekerja sama. Seperti pada implementasi kerja sama di bidang ekonomi yang berjalan baik. Hingga kerja sama yang menguntungkan kedua belah pihak seperti dalam upaya kerja sama eksplorasi

minyak dan gas di Laut Tiongkok Selatan. Sedangkan, *external shocks* cenderung melihat dari peristiwa dramatis yang membentuk persepsi pengambil keputusan. Sikap skeptis Duterte terhadap AS ditambah dengan sikap netral AS terhadap insiden Scarborough shoal. Faktor ini pula yang menjadikan Presiden Duterte yakin bahwa mendekati Tiongkok tanpa adanya konfrontasi militer adalah upaya yang paling benar dibanding harus menunggu AS untuk membantu membela Filipina. Jika dilihat secara seksama kedua faktor yang paling dominan adalah faktor yang sangat berkaitan dengan pengambil keputusan yakni Presiden Duterte. Faktor lainnya seperti *bureaucratic advocacy* dan *domestic restructuring* tidak berkontribusi besar terhadap perubahan kebijakan luar negeri Filipina. Walaupun Filipina merupakan negara demokrasi yang mengutamakan prinsip *checks and balances* pada birokrasi Filipina. Namun, masih ada kekurangan dalam prinsip tersebut. Seperti misalnya, melemahnya oposisi dalam lembaga legislatif hingga meningkatnya pejabat yang berasal dari partai Presiden Duterte. Sama halnya dengan birokrasi Filipina dengan

Faktor-faktor inilah yang membawa Duterte untuk mengupayakan upaya strategis terhadap ancaman dari Tiongkok. Penulis menemukan bahwa upaya strategis Duterte terhadap Tiongkok cenderung merujuk pada strategi *hedging*. Dari kelima indikator yang dipaparkan oleh Cheng Cwee Kuik, semua indikator seperti *limited bandwagoning*, *binding engagement*, *economic pragmatism*, *dominance denial*, serta *indirect balancing* sesuai dengan strategi yang dilakukan oleh Presiden Rodrigo Duterte. Strategi ini yang memungkinkan Duterte untuk tetap sedikit mempertahankan kehadiran AS beserta sekutunya di Asia Timur yakni Jepang di dalam Filipina. Sambil mempertahankan kehadiran AS, Duterte mencoba mengambil keuntungan dari ancaman yang diberikan oleh Tiongkok. Keuntungan tersebut kemudian dimaksimalkan menjadi kerja sama yang menjadikan Filipina mendapatkan investasi langsung atas pembangunan infrastruktur negara.

## 5.2 Saran

Dalam hal ini, penulis juga menyadari bahwa penelitian ini masih perlu adanya perbaikan di dalam beberapa hal. Oleh sebab itu, penulis memberikan saran kepada pengkaji kajian Hubungan Internasional yang akan menulis dengan topik

serupa dengan penelitian ini. Penulis menyarankan untuk memperkaya cakupan pembahasan mengenai implikasi kebijakan luar negeri Filipina terhadap wilayah sengketa. Selain itu, penulis menyarankan untuk melakukan eksplorasi lebih dalam mengenai dinamika perubahan politik luar negeri Filipina tidak hanya terhadap AS dan Tiongkok namun juga terhadap negara-negara Asia Tenggara lainnya. Sehingga, sudut pandang yang ada dalam penelitian dapat menjadi lebih luas.

## DAFTAR PUSTAKA

- ABS-CBN News (Direktur). (2015, Juni 24). *Duterte: We can't go to war with China* [Interview]. <https://www.youtube.com/watch?v=AtVH5mlIViU>
- Al Jazeera. (2020). *Radio journalist shot dead outside home in the Philippines*. Al Jazeera. <https://www.aljazeera.com/news/2020/11/11/radio-journalist-shot-dead-outside-home-in-the-philippines>
- Al Jazeera. (2021, Mei). *Duterte bans Philippines cabinet from speaking on South China Sea*. Al Jazeera. <https://www.aljazeera.com/news/2021/5/18/philippines-duterte-issues-gag-order-over-south-china-sea>
- Alden, C., & Aran, A. (2016). *Foreign Policy Analysis: New approaches* (2 ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315442488>
- Arao, D. A. (2021, November 7). *Press freedom is no joke in the Philippines | East Asia Forum*. <https://eastasiaforum.org/2021/11/07/press-freedom-is-no-joke-in-the-philippines/>
- As, B. (2018). The Study of Foreign Policy in International Relations. *Journal of Political Sciences & Public Affairs*, 06(04). <https://doi.org/10.4172/2332-0761.1000337>
- Balboa, J. (2020). *Duterte's Foreign Policy Pivot and Its Impact on Philippine Trade and Investments: An International Political Economy Perspective in: Philippine Political Science Journal. Volume 41*(Issue 1-2). [https://brill.com/view/journals/ppsj/41/1-2/article-p127\\_7.xml?language=en](https://brill.com/view/journals/ppsj/41/1-2/article-p127_7.xml?language=en)
- Bao, T. T., & Thao, N. T. P. (2023). The Policy of the Philippines towards the US and China in a changing World Order (2001-2021). *GLS KALP – Journal of Multidisciplinary Studies*, 3(1), 50–64.
- Bautista, L. B. (2013). The Philippine Claim to Bajo de Masinloc in the Context of the South China Sea Dispute. *Journal of East Asia and International Law*, 6(2). <https://doi.org/10.14330/jeail.2013.6.2.08>
- Baviera, A. S. P. (2016). President Duterte's Foreign Policy Challenges. *Contemporary Southeast Asia*, 38(2), 202–208.
- Bryman, A. (2012, Maret 21). *Social Research Methods, 4th Edition*. <https://www.semanticscholar.org/paper/Social-Research-Methods%2C-4th-Edition-Bryman/432eb124202ead1410aaff653847ba8a093bdf4c>

- Buenaventura, T. (2023, Juli 13). The Communist Insurgency in the Philippines: A ‘Protracted People’s War’ Continues. *ACLEDA*. <https://acleddata.com/2023/07/13/the-communist-insurgency-in-the-philippines-a-protracted-peoples-war-continues/>
- Bueza, M. (2019, Juli 2). 18th Congress, by the numbers. *RAPPLER*. <https://www.rappler.com/newsbreak/iq/234302-numbers-composition-18th-congress-philippines/>
- Camroux, D. (2016, November 26). *Duterte’s undermining of ASEAN*. East Asia Forum. <https://www.eastasiaforum.org/2016/11/26/dutertes-undermining-of-asean/>
- Candice, J. J., & Perwita, A. A. B. (2021). Equi-Balancing’ Foreign Policy of The Philippines Toward China: The Implementation Of The Philippines’ Cooperative Maritime Diplomacy To China In The South China Sea Dispute. *Jurnal Studi Diplomasia Dan Keamanan*, 13(1), Article 1. <https://doi.org/10.31315/jsdk.v13i1.4408>
- Carlnaes, W. (2016). Actors, Structures and Foreign Policy Analysis. Dalam S. Smith, A. Hadfield, & T. Dunne, *Foreign Policy: Theories, Actors, Cases*. Oxford University Press.
- Carpenter, T. G. (2016, November 5). *What Are the Philippines and Malaysia Doing When It Comes to China? (It’s Called Bandwagoning)* | *Cato Institute*. CATO Institute. <https://www.cato.org/commentary/what-are-philippines-malaysia-doing-when-it-comes-china-its-called-bandwagoning>
- Castro, R. D. (2014). The 21st century Philippine-U.S. enhanced defense cooperation agreement (EDCA): The Philippines’ policy in facilitating the Obama administration’s strategic pivot to Asia. *Korean Journal of Defense Analysis*, 26(4), 427–446.
- Castro, R. D. (2017). The Duterte Administration’s Foreign Policy: Unravelling the Aquino Administration’s Balancing Agenda on an Emergent China. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 35(3), 139–159.
- Castro, R. D. (2018a). Explaining the Duterte Administration’s Appeasement Policy on China: The Power of Fear. *Asian Affairs: An American Review*, 45(3–4), 165–191. <https://doi.org/10.1080/00927678.2019.1589664>
- Castro, R. D. (2018b). *[Indo-Pacific Focus] Policy Brief No.221st Century Philippine Maritime Security Policy: From Balancing to Appeasement*. <https://www.jiia.or.jp/en/column/2018/06/column-4.html>
- Castro, R. D. (2019). China’s Belt and Road Initiative (BRI) and the Duterte Administration’s Appeasement Policy: Examining the Connection

- Between the Two National Strategies. *East Asia*, 36(3), 205–227.  
<https://doi.org/10.1007/s12140-019-09315-9>
- Castro, R. D. (2020). The Limits of Intergovernmentalism: The Philippines' Changing Strategy in the South China Sea Dispute and Its Impact on the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 39(3), 335–358.  
<https://doi.org/10.1177/1868103420935562>
- Castro, R. D. (2022). *Post-Duterte Philippine Foreign Policy: A Matter of Change – or of Seeking Equilibrium?* Asia Global Online.  
<https://www.asiaglobalonline.hku.hk/post-duterte-philippine-foreign-policy-matter-change-or-seeking-equilibrium>
- Cayabyab, M. J. (2016, Oktober 18). PH at a disadvantage in Duterte's trade mission to China—Solon. *INQUIRER.Net*.  
<https://globalnation.inquirer.net/147031/ph-at-a-disadvantage-in-dutertes-trade-mission-to-china-solon>
- Center for Strategic and International Studies. (2020). *The Long Patrol: Staredown at Thitu Island Enters its Sixteenth Month*. Asia Maritime Transparency Initiative. <https://amti.csis.org/the-long-patrol-staredown-at-thitu-island-enters-its-sixteenth-month/>
- Cepeda, M. (2016, Agustus 1). LIST: House committee chairmanships of the 17th Congress. *RAPPLER*. <https://www.rappler.com/nation/141610-house-committees-17th-congress/>
- Committee to Protect Journalists. (2021). Killers of journalists still get away with murder. *Committee to Protect Journalists*.  
<https://cpj.org/reports/2021/10/killers-of-journalists-still-get-away-with-murder/>
- Committee to Protect Journalists. (2022). *Committee to Protect Journalists – Defending Journalists Worldwide*. Committee to Protect Journalists.  
<https://cpj.org/>
- Council on Foreign Relations. (2023). *Timeline: China's Maritime Disputes*. Council on Foreign Relations. <https://www.cfr.org/timeline/chinas-maritime-disputes>
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (3rd ed). SAGE Publications.
- Croissant, A. (2003). Legislative powers, veto players, and the emergence of delegative democracy: A comparison of presidentialism in the Philippines and South Korea. *Democratization*, 10(3), 68–98.  
<https://doi.org/10.1080/13510340312331293937>



- Custer, S., Russell, B., DiLorenzo, M., Cheng, M., Ghose, S., Desai, H., Sims, J., & Turner, J. (2018). Ties that Bind: Quantifying China's public diplomacy and its "good neighbor" effect. *AidData at William & Mary*. [https://docs.aiddata.org/ad4/pdfs/Ties\\_That\\_Bind--Full\\_Report.pdf](https://docs.aiddata.org/ad4/pdfs/Ties_That_Bind--Full_Report.pdf)
- Department Of Foreign Affairs Republic of The Philippine. (2016). *Joint Statement of the Republic of the Philippines and the People's Republic of China*. <https://dfa.gov.ph/dfa-releases/10748-joint-statement-of-the-republic-of-the-philippines-and-the-people-s-republic-of-china>
- Department Of Foreign Affairs Republic of The Philippine. (2017). *Japan—Philippines Joint Statement on Bilateral Cooperation for the Next Five Years*. <https://dfa.gov.ph/dfa-news/statements-and-advisoriesupdate/14482-japan-philippines-joint-statement-on-bilateral-cooperation-for-the-next-five-years>
- Dewi, H. D. (2019). How Duterte States His View on The Philippines and Others Countries Relation: A Discursive Strategy Analysis. *JEELS (Journal of English Education and Linguistics Studies)*.
- Dexian, C. C. (2013). Hedging for Maximum Flexibility: Singapore's Pragmatic Approach to Security Relations with the US and China. *SAFTI MI Library*, 39. <https://saftimi.spydus.com.sg/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/WPAC/BIBENQ?SETLVL=&BRN=129690>
- Doerer, F. (2013). Leader-driven foreign-policy change: Denmark and the Persian Gulf War. *International Political Science Review*, 34(5), 582–597. <https://doi.org/10.1177/0192512112473027>
- Dugis, V. (2008). Explaining Foreign Policy Change. *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*. <https://www.semanticscholar.org/paper/Explaining-Foreign-Policy-Change-Dugis/dc4b4e24cb9ed5ad9acb7f0170fb7ca55d158175>
- Duong, H. (2015, Juli 1). *A Fair and Effective Code of Conduct for the South China Sea*. Asia Maritime Transparency Initiative. <https://amti.csis.org/a-fair-and-effective-code-of-conduct-for-the-south-china-sea/>
- Embassy of the People's Republic of China in the Republic of the Philippines. (2021). *China-Philippines Relations Shine Brighter in the Tempering of Time*. [http://ph.china-embassy.gov.cn/eng/sgxx/dsjh/202106/t20210609\\_8940429.htm](http://ph.china-embassy.gov.cn/eng/sgxx/dsjh/202106/t20210609_8940429.htm)
- Flores, H. (2018). 84% of Filipinos oppose Duterte admin's inaction on China 'intrusion' — SWS. *Philstar.com*. <https://www.philstar.com/headlines/2018/11/21/1870397/84-filipinos-oppose-duterte-admins-inaction-china-intrusion-sws>
- Fook, L. L. (2019). *China-Philippine Relations: Duterte's China Visit and Prospects for Oil and Gas Exploration*.

- Fravel, M. T., & Miura, K. (2020). *Stormy Seas: The South China Sea in US-China Relations*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3680649>
- Freund, E. (2017). *Freedom of Navigation in the South China Sea* [Special Report]. Harvard Kennedy School. <https://www.belfercenter.org/sites/default/files/files/publication/SCS%20Report%20-%20web.pdf>
- Gagliano, J. (2016, Februari 29). FONOPS and Deterrence: There's No "FDO" in "FONOPS." *USNI Blog*. <https://blog.usni.org/posts/2016/02/29/fonops-and-deterrence-theres-no-fdo-in-fonops>
- Galang, M. (2020). *The Philippines-US Visiting Forces Agreement and small power foreign policy*.
- Galang, M. A. (2023, Desember 9). *Continuity And Change: The Evolution Of Philippine National Security Policy – Analysis*. *Eurasia Review*. <https://www.eurasiareview.com/09122023-continuity-and-change-the-evolution-of-philippine-national-security-policy-analysis/>
- Gao, Z., & Jia, B. B. (2013). The Nine-Dash Line in the South China Sea: History, Status, and Implications. *American Journal of International Law*, 107(1), 98–123. <https://doi.org/10.5305/amerjintelaw.107.1.0098>
- Geducos, A. C. (2019). Palace: Hague ruling not shelved, just unenforceable. *Manila Bulletin*. <https://mb.com.ph/2019/04/14/palace-hague-ruling-not-shelved-just-unenforceable/>
- Geib, P., & Pfaff, L. (2016). The Dynamics of Chinese Expansion in the South China Sea. *THE JOURNAL OF APPLIED BUSINESS AND ECONOMICS*. <https://www.semanticscholar.org/paper/The-Dynamics-of-Chinese-Expansion-in-the-South-Sea-Geib-Pfaff/2fb9fab460d04531443e59dcc4d07bcccd355e6a>
- Grossman, D. (2021, November 2). *Duterte's Dalliance with China Is Over*. <https://www.rand.org/blog/2021/11/dutertes-dalliance-with-china-is-over.html>
- Guo, R. (2011). *Territorial Disputes and Conflict Management: The art of avoiding war* (1 ed.). Routledge. <http://gen.lib.rus.ec/book/index.php?md5=A1B0E847707CD705A4C8F1E787CFB64B>
- Halperin, M. H., Clapp, P., & Kanter, A. (2006). *Bureaucratic politics and foreign policy* (2nd ed). Brookings Institution Press. [http://www.untagsmd.ac.id/files/Perpustakaan\\_Digital\\_1/BUREAUCRACY%20Bureaucratic%20Politics%20and%20Foreign%20Policy.pdf](http://www.untagsmd.ac.id/files/Perpustakaan_Digital_1/BUREAUCRACY%20Bureaucratic%20Politics%20and%20Foreign%20Policy.pdf)

- Hendler, B. (2018). Duterte's Pivot to China, and Prospects for Settling the South China Sea Disputes. *Contexto Internacional*, 40(2), 319–337. <https://doi.org/10.1590/s0102-8529.2018400200005>
- Hermann, C. F. (1990). Changing Course: When Governments Choose to Redirect Foreign Policy. *International Studies Quarterly*, 34(1), 3. <https://doi.org/10.2307/2600403>
- Heydarian, R. (2018). *Duterte the Peacemaker?* Council on Foreign Relations. <https://www.cfr.org/blog/duterte-peacemaker>
- Heydarian, R. J. (2015, Agustus 17). *China and the Philippines: Asia's Most Toxic Relationship*. HuffPost. [https://www.huffpost.com/entry/china-and-the-philippines\\_b\\_7997158](https://www.huffpost.com/entry/china-and-the-philippines_b_7997158)
- Heydarian, R. J. (2016). The US-Philippine-China Triangle: From Equi-balancing to Counter-Balancing amid the South China Sea Disputes. Dalam E. Fels & T.-M. Vu (Ed.), *Power Politics in Asia's Contested Waters: Territorial Disputes in the South China Sea* (hlm. 337–357). Springer International Publishing. [https://doi.org/10.1007/978-3-319-26152-2\\_16](https://doi.org/10.1007/978-3-319-26152-2_16)
- Heydarian, R. J. (2017a, Maret 7). *Under Duterte, ASEAN Could Cede Clout for Consensus*. Asia Maritime Transparency Initiative. <https://amti.csis.org/duterte-asean-cede-clout/>
- Heydarian, R. J. (2017b, Maret 13). *Duterte and ASEAN*. Council on Foreign Relations. <https://www.cfr.org/blog/duterte-and-asean>
- Heydarian, R. J. (2023). *Why AUKUS Matters to Manila in the Age of Great Power Competition*. *Indo-Pasific Defence Security*. [https://perthusasia.edu.au/PerthUSAsia/media/Perth\\_USAsia/Publications/Philippine-Exceptionalism-Why-AUKUS-Matters-to-Manila-in-the-Age-of-Great-Power-Competition.pdf](https://perthusasia.edu.au/PerthUSAsia/media/Perth_USAsia/Publications/Philippine-Exceptionalism-Why-AUKUS-Matters-to-Manila-in-the-Age-of-Great-Power-Competition.pdf)
- Hudson, V. M. (2016). The history and evolution of foreign policy analysis. Dalam *Foreign Policy*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/hepl/9780198708902.003.0001>
- Ide, B. (2016, Oktober 20). *Goodbye Washington! Ni Hao Beijing! Territorial shelved as Manila announces "separation" of mil and econ ties with US*. VOA. <https://www.voanews.com/a/duterte-declares-philippine-separation-from-us/3559129.html>
- Iglesias, S., & Ordenes, L. (2020, Juli 29). *The Philippines 2018-2019: Authoritarian consolidation under Duterte*. Asia Maior - An Italian think tank on Asia. <https://www.asiamaior.org/the-journal/13-asia-maior-vol-xxx-2019/the-philippines-2018-2019-authoritarian-consolidation-under-duterte.html>

- Imanuddin, A. F., & Sugito, S. (2021). The Strategy of Power Politics of the Philippines in Facing China in the South China Sea Conflict. *Nation State*, 4(2). <https://doi.org/10.24076/nsjis.v4i2.526>
- INQUIRER.net (Direktur). (2017, November 12). *Duterte on South China Sea dispute: It's not time for aggression* [Youtube Video]. <https://www.youtube.com/watch?v=pYQDkcLGkqs>
- Institute for China-America Studies. (2016, November 1). *FONOPs in the South China Sea*. ICAS. <https://chinaus-icas.org/research/fonops-in-the-south-china-sea/>
- Iwardani, D. (2015). Strategic Interest Projection in South China Sea Conflict. *Jurnal Pertahanan: Media Informasi Tentang Kajian Dan Strategi Pertahanan Yang Mengedepankan Identity, Nasionalism & Integrity*, 1(1), 39–50. <https://doi.org/10.33172/jp.v1i1.54>
- Julio Amador III, Deryk Matthew N. Baladjay, Ilaria Carrozza, Marte Nilsen, & Øystein H. Rolandsen. (2021). *An Appraisal of Philippines-China Security Relations under the Duterte Administration (2016–2020) – Peace Research Institute Oslo (PRIO)*. <https://www.prio.org/publications/12888>
- Kabiling, G. (2021). *Enrile to Duterte: History will judge you very well*. Manila Bulletin. <https://mb.com.ph/2021/05/18/enrile-to-duterte-history-will-judge-you-very-well>
- Koga, K. (2018). The Concept of “Hedging” Revisited: The Case of Japan’s Foreign Policy Strategy in East Asia’s Power Shift. *International Studies Review*, 20(4), 633–660. <https://doi.org/10.1093/isr/vix059>
- Kreuzer, P. (2018). *Dealing with China in the South China Sea: Duterte changing course*. Peace Research Institute Frankfurt (PRIF).
- Kuik, C.-C. (2008). The Essence of Hedging: Malaysia and Singapore’s Response to a Rising China. *Contemporary Southeast Asia*, 30(2), 159–185. <https://doi.org/10.1355/CS30-2A>
- Kuik, C.-C. (2016). How Do Weaker States Hedge? Unpacking ASEAN states’ alignment behavior towards China. *Journal of Contemporary China*, 25(100), 500–514. <https://doi.org/10.1080/10670564.2015.1132714>
- Kuik, C.-C. (2021). Getting hedging right: A small-state perspective. *China International Strategy Review*, 3(2), 300–315. <https://doi.org/10.1007/s42533-021-00089-5>
- Kundu, S. (2016, Mei 21). *China divides ASEAN in the South China Sea*. East Asia Forum. <https://www.eastasiaforum.org/2016/05/21/china-divides-asean-in-the-south-china-sea/>

- Legaspi, A. (2018, Juni 12). *Hontiveros calls for foreign policy audit of Duterte admin.* GMA News Online. <https://www.gmanetwork.com/news/topstories/nation/656612/hontiveros-calls-for-foreign-policy-audit-of-duterte-admin/story/>
- Marcelo, V. (2018). *Duterte: China an “important ingredient” in “Build, Build, Build” program.* Cnn. <https://www.cnnphilippines.com/news/2018/04/09/duterte-china-xi-jinping-build-build-build.html>
- Medillo, R. J. (2020). Seeking Accountability, Legitimacy, and Transparency: Congressional Intervention in the Philippines’ South China Sea Policy. *Philippine Political Science Journal*, 41(1–2), 161–191. <https://doi.org/10.1163/2165025X-BJA10008>
- Merrills, J. G. (2005). *International dispute settlement* (4th ed). Cambridge University Press.
- Ministry of Foreign Affairs of Japan. (2016). *Agreement between the Government of Japan and the Government of the Philippines Concerning the Transfer of Defense Equipment and Technology.* <https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000152490.pdf>
- Ministry of Foreign Affairs of People’s Republic of China. (2016, Oktober 21). *JOINT STATEMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA AND THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES.* [https://www.fmprc.gov.cn/eng/wjdt\\_665385/2649\\_665393/201610/t20161021\\_679488.html](https://www.fmprc.gov.cn/eng/wjdt_665385/2649_665393/201610/t20161021_679488.html)
- Ministry of Foreign Affairs, the People’s Republic of China. (2017). *Joint Statement between the Government of the People’s Republic of China and the Government of the Republic of the Philippines.* [https://www.fmprc.gov.cn/eng/gjhdq\\_665435/2675\\_665437/2762\\_663528/2763\\_663530/201711/t20171116\\_520924.html](https://www.fmprc.gov.cn/eng/gjhdq_665435/2675_665437/2762_663528/2763_663530/201711/t20171116_520924.html)
- Mogato, M. (2016, September 12). Duterte says he wants U.S. special forces out of southern Philippines. *Reuters.* <https://www.reuters.com/article/us-philippines-usa-duterte-idUSKCN11I10J>
- NEDA. (2020). *Official Development Assistance Portfolio Review 2019.* <https://neda.gov.ph/oda-portfolio-review-2019/>
- Ninkov, A., Frank, J. R., & Maggio, L. A. (2022). Bibliometrics: Methods for studying academic publishing. *Perspectives on Medical Education*, 11(3), 173–176. <https://doi.org/10.1007/s40037-021-00695-4>
- Official Gazette of the Republic of the Philippines. (1951, Agustus 30). *Mutual Defense Treaty between the Republic of the Philippines and the United States of America, August 30, 1951 | GOVPH.* Official Gazette of the

Republic of the Philippines.  
<https://www.officialgazette.gov.ph/1951/08/30/mutual-defense-treaty-between-the-republic-of-the-philippines-and-the-united-states-of-america-august-30-1951/>

Official Gazette of the Republic of the Philippines. (2024, Mei 3). *Philippines Foreign Policy*. Official Gazette of the Republic of the Philippines. <https://dfa.gov.ph/about/phl-foreign-policy>

Petty, M., & Morales, N. J. (2017, Maret 23). Philippines' Duterte derides U.S. for past inaction in South China Sea. *Reuters*. <https://www.reuters.com/article/us-southchinasea-philippines-idUSKBN16U28X>

*Philippine Government*. (2023). <https://www.officialgazette.gov.ph/about/gov/>

Philippines Government. (2011, Agustus 18). *National Security Policy 2011-2016: Securing the Gains of Democracy | GOVPH*. Official Gazette of the Republic of the Philippines. <https://www.officialgazette.gov.ph/2011/08/18/national-security-policy-2011-2016/>

Philippines News Agency. (2018). *PH, China ink 29 deals during Xi's Manila visit*. <https://www.pna.gov.ph/articles/1054454>

*Philippines (PHL) and China (CHN) Trade | OEC*. (2023). [dataset]. <https://oec.world/en/profile/bilateral-country/phl/partner/chn#historical-data>

Poushter, J., & Bishop, C. (2017, September 21). People in the Philippines Still Favor U.S. Over China, but Gap Is Narrowing. *Pew Research Center's Global Attitudes Project*. <https://www.pewresearch.org/global/2017/09/21/people-in-the-philippines-still-favor-u-s-over-china-but-gap-is-narrowing/>

Press, A. (2016, September 5). *Duterte Tells Obama Not to Question Him About Killings*. Voice of America. <https://www.voanews.com/a/duterte-tells-obama-not-to-question-him-about-killings/3494026.html>

Press, A. (2017, April 30). *Duterte Drops Mention of South China Sea in ASEAN Statement*. Voice of America. <https://www.voanews.com/a/duterte-south-china-sea-asean-statement/3831645.html>

Public Private Partnership Center, Republic of the Philippines. (2017). *Philippines-China dev't plan seen completed in February | PPP Center*. [https://ppp.gov.ph/in\\_the\\_news/philippines-china-devt-plan-seen-completed-in-february/](https://ppp.gov.ph/in_the_news/philippines-china-devt-plan-seen-completed-in-february/)

- Quintos, M. F. A. (2018). The Philippines: Hedging in a Post-Arbitration South China Sea? *Asian Politics & Policy*, 10(2), 261–282. <https://doi.org/10.1111/aspp.12394>
- Ranada, P. (2019, Mei 30). Duterte EO removes obstacle to oil exploration deal with China firm. *RAPPLER*. <https://www.rappler.com/nation/231830-duterte-executive-order-removes-obstacle-oil-exploration-deal-china-firm/>
- Raymond, M., & Welch, D. A. (2022). What’s Really Going On in the South China Sea? *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 41(2), 214–239. <https://doi.org/10.1177/18681034221086291>
- Republic of the Philippines. (2011, Agustus 18). *Statement of the DFA on President Aquino’s visit to China, August 18, 2011 | GOVPH*. Official Gazette of the Republic of the Philippines. <https://www.officialgazette.gov.ph/2011/08/18/statement-of-the-dfa-on-the-visit-of-president-aquino-iii-to-china-august-18-2011/>
- Republic of the Philippines. (2014). *APEC 2014 | GOVPH*. Official Gazette of the Republic of the Philippines. <https://www.officialgazette.gov.ph/presidential-trips/apec-2014/>
- Sacks, B. J. (2022). *The Political Geography of the South China Sea Disputes: A RAND Research Primer*. RAND Corporation. <https://www.rand.org/pubs/perspectives/PEA2021-1.html>
- Sağlık, E. E. (2023, Februari 14). Increased Security and Stability? US Access to Military Bases in the Philippines. *Politics Today*. <https://politicstoday.org/united-states-military-bases-in-the-philippines/>
- Senate of the Philippines. (2022). *SEPO\_AAG on Infrastructure Flagship Projects\_22Feb2022.pdf* (AAG-22-01). [https://legacy.senate.gov.ph/publications/SEPO/SEPO\\_AAG%20on%20Infrastructure%20Flagship%20Projects\\_22Feb2022.pdf](https://legacy.senate.gov.ph/publications/SEPO/SEPO_AAG%20on%20Infrastructure%20Flagship%20Projects_22Feb2022.pdf)
- Senate of the Philippines. (2023). *Biography of Senate President Villar*. <https://legacy.senate.gov.ph/senators/senpres/enrile.asp>
- Simon, S., & Baker, C. (2017, Januari 13). *Philippine Follies*. Comparative Connections. <https://cc.pacforum.org/2017/01/philippine-follies/>
- SIPRI Milex Database*. (2023). [dataset]. <https://doi.org/10.55163/CQGC9685>
- Stiles, K. (2018). *Trust and Hedging in International Relations*. University of Michigan Press. <https://doi.org/10.3998/mpub.9750852>
- Sullivan, M. (2016, September 23). Criticized Abroad, Philippines’ Leader Remains Hugely Popular In Home City. *NPR*.

<https://www.npr.org/sections/parallels/2016/09/23/495012102/criticized-abroad-philippines-leader-remains-hugely-popular-in-home-city>

- Sunnexdesk. (2015, April 17). *Aquino: Imperative now to push for COC in South China Sea*. SunStar Publishing Inc. <https://www.sunstar.com.ph/more-articles/aquino-imperative-now-to-push-for-coc-in-south-china-sea>
- Synergia Foundation. (2017, Mei 2). *Conflict continues over South China Sea*. Synergia Foundation. <https://www.synergiafoundation.org/insights/analyses-assessments/conflict-continues-over-south-china-sea>
- Talamayan, F. (2022). *The Philippine Pivot to China and Russia: Duterte's Foreign Policy Revisited* (SSRN Scholarly Paper 4317343). <https://papers.ssrn.com/abstract=4317343>
- Thayler, C. A. (2012). ASEAN'S Code of Conduct in the South China Sea: A Litmus Test for Community-Building? *The Asia-Pacific Journal: Japan Focus*, 10(34). <https://apjjf.org/2012/10/34/Carlyle-A.-Thayer/3813/article.html>
- The Australian. (2017). *Turnbull meets Duterte*. <https://dsf.newscorpastralia.com/theaustralian/subscription/>
- The National Bureau of Asian Research. (2023). *Philippines*. Country Profile from the Maritime Awareness Project of Philippines. <https://www.nbr.org/publication/philippines/>
- Thompson, M. R., & Mendoza, D. J. (2018). Congress: Separate but not Equal. Dalam *Routledge Handbook of the Contemporary Philippines*. Routledge. [https://www.academia.edu/38171798/Routledge\\_Handbook\\_of\\_the\\_Contemporary\\_Philippines](https://www.academia.edu/38171798/Routledge_Handbook_of_the_Contemporary_Philippines)
- Timberman, D. G. (2019). Philippine Politics Under Duterte: A Midterm Assessment. *Carnegie Endowment for International Peace*. <https://carnegieendowment.org/2019/01/10/philippine-politics-under-duterte-midterm-assessment-pub-78091>
- Tran, B. T. (2019). Presidential Turnover and Discontinuity in the Philippines' China Policy. *Asian Perspective*, 43(4), 621–646. <https://doi.org/10.1353/apr.2019.0026>
- Tran, B. T. (2021). New Philippine President, New China Policy? *The Diplomat*. <https://thediplomat.com/2021/12/new-philippine-president-new-china-policy/>
- United States Studies Centre. (2021). *What is the AUKUS partnership?* <https://www.ussc.edu.au/explainer-what-is-the-aukus-partnership>



- US Department of State. (2012, April 30). *Remarks With Secretary of Defense Leon Panetta, Philippines Foreign Secretary Albert del Rosario, and Philippines Defense Secretary Voltaire Gazmin After Their Meeting- Archived Document*. U.S. Department of State. //2009-2017.state.gov/secretary/20092013clinton/rm/2012/04/188982.htm
- U.S. Security Cooperation with the Philippines. (2022). United States Department of State. <https://www.state.gov/u-s-security-cooperation-with-the-philippines/>
- Velasco, M. A. M. (2014). *Philippines – China Relations: The Case of the South China Sea (Spratly Islands) Claims*. 2(6).
- Vergun, D. (2023). *New EDCA Sites Named in the Philippines*. U.S. Department of Defense. <https://www.defense.gov/News/News-Stories/Article/Article/3350297/new-edca-sites-named-in-the-philippines/https%3A%2F%2Fwww.defense.gov%2FNews%2FNews-Stories%2FArticle%2FArticle%2F3350297%2Fnew-edca-sites-named-in-the-philippines%2F>
- Walt, S. M. (2000). *Keeping the World Off Balance: Self Restraint and U.S. Foreign Policy* (SSRN Scholarly Paper 253799). <https://doi.org/10.2139/ssrn.253799>
- Winston, R. A. (2020). *Philippine Hedging Strategy in the South China Sea: An Analysis of Approaches by President Benigno Aquino III and President Rodrigo Duterte*. <https://dash.harvard.edu/handle/1/37365047>
- Wong, A. C. (2020). *Leader-driven Change from Aquino to Duterte: Towards a Redirection or Restructuring in Philippine Foreign Policy?*
- Wong, A. C. (2021). *Philippines: Aquino's death marks another democratic turning point | Lowy Institute*. Lowy Institute. <https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/philippines-aquino-s-death-marks-another-democratic-turning-point>
- Woods, S. (2016). The Sino-Philippine South China Sea Dispute. *American Journal of Chinese Studies*, 23, 159–171.
- York, M. (2015). ASEAN'S AMBIGUOUS ROLE IN RESOLVING SOUTH CHINA SEA DISPUTES. *Indonesian Journal of International Law*, 12(3). <https://doi.org/10.17304/ijil.vol12.3.607>
- Zhang (张 锋), F. (2017). Assessing China's response to the South China Sea arbitration ruling. *Australian Journal of International Affairs*, 71(4), 440–459. <https://doi.org/10.1080/10357718.2017.1287876>

Zhao, S. (2018). China and the South China Sea Arbitration: Geopolitics Versus International Law. *Journal of Contemporary China*, 27(109), 1–15. <https://doi.org/10.1080/10670564.2017.1363012>